



STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA

Tim Ditjenbud

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2000



STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA

**PENYUSUN
TIM DITJENBUD**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2000**

**STRATEGI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
INDONESIA**

EDITOR
TIM DITJENBUD

PENERBIT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DISAIN COVER
RISMAN MARAH

GAMBAR COVER
RELIF CANDI BOROBUDUR

COPYRIGHT
DITJENBUD 2000

ISBN 979-95068-9-1

KATA PENGANTAR

Di tengah-tengah tatanan kehidupan baru dunia berubah menuju globalisasi, di dalam masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan politik menuju kehidupan yang demokratis. Perubahan politik itu membawa perubahan, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehubungan dengan itu, upaya pembiasaan dan pengembangan kebudayaan perlu diserasikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan perlu menyusun strategi pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan tugas di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam rangka penyusunan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menyelenggarakan Seminar Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan untuk memperoleh masukan dari para pakar dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Selepas seminar itu disusunlah naskah awal Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan yang dikerjakan oleh Prof. Dr. Andre Hardjana, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Ki Supriyoko, dan Dr. Kuntowijoyo. Naskah itu selanjutnya dibahas dikalangan terbatas di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk memperoleh masukan dalam upaya penyempurnaan, sehingga menjadi bentuk seperti ini.

Sekali pun telah dilakukan upaya penyempurnaan isi buku ini, kami percaya bahwa pada buku ini masih ada kekurangan. Untuk itu, kami berharap para pembaca bersedia meluangkan waktu untuk memberikan catatan-catatan sebagai masukan dalam upaya penyempurnaan buku ini.

Kepada para penulis dan pihak-pihak lain yang ikut memberikan sumbangan pikiran dan tenaga dalam “kehadiran” buku ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Desember 2000

Direktur Jenderal Kebudayaan



I G. N. Anom

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Kerangka Pikir	6
BAB II FILOSOFI, SIFAT, DAN NILAI DASAR	8
A. Filosofi Kebudayaan	8
B. Sifat-sifat	10
C. Nilai Dasar	13
BAB III. LINGKUNGAN DAN KONDISI KEBUDAYAAN	18
A. Tingkat Lingkungan	18
B. Lingkungan Sebagai Tantangan	19
1. Bidang Politik	19
2. Bidang Ekonomi	19
3. Bidang Sosial	23
4. Bidang Pendidikan	24
5. Bidang Hukum dan Keamanan	26
6. Bidang Agama	28
7. Bidang Ekologi	29
C. Kondisi Berkebudayaan	31
BAB IV. VISI DAN MISI	34
A. Visi Kebudayaan	34
B. Misi Kebudayaan	35
BAB V. KEBUDAYAAN INDONESIA MASA DEPAN: MASYARAKAT MADANI.....	36
A. Pengertian Masyarakat Madani	36
B. Masyarakat Madani Indonesia	39
1. Religius dan Berbudi Luhur	39
2. Adil dan Sejahtera	40
3. Demokratis dan Toleran	41
4. Mandiri dan Bertanggung Jawab	41

5. Tertib dan Teratur	42
6. Setara dan Berkebersamaan	43
7. Integritas dan Berketangguhan Budaya	44
8. Dinamis dan Berorientasi Ke Depan	45
C. Perubahan Budaya	46
1. Perubahan Sistem Pengetahuan	47
a. Egosentrisme Ke Sivilitas	47
b. Pengabaian Hukum ke Kesadaran Hukum	48
c. Fanatisme ke Toleransi	49
d. Cukup Diri ke Saling Bergantung	50
e. Sejarah yang Alamiah ke Sejarah yang Manusiawi	51
2. Perubahan Budaya Politik	52
a. Kawula ke Warga Negara	52
b. Parokial ke Kenegaraan	53
c. Negara Serba Kuasa ke Negara Serba Sederhana	54
d. Pancasila sebagai Ideologi ke Pancasila sebagai Ilmu	55
e. Ideologi Pancasila yang Inkoheren ke “Ideologi” Pancasila yang Koheren	56
f. Pancasila yang hanya Mempersoalkan Urusan Personal ke Pancasila yang juga Mempersoalkan Urusan Publik	57
g. Pancasila yang Terpisah Menjadi Pancasila yang satu	57
BAB VI. STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	59
A. Pandangan Dasar	59
B. Dinamika dan Tataran Kebudayaan	60
C. Konsistensi Antartataran Kebudayaan	64
D. Kebudayaan Bangsa: Ciri dan Fungsi	65
E. Peradaban Modern dan Globalisasi	68
F. Globalisasi dan Otonomi Daerah	73
G. Strategi Sosialisasi dan Pembelajaran	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya atau kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu karya atau buah budi kelompok manusia. Budaya atau kebudayaan sekaligus merupakan sistem nilai yang dihayati oleh sekelompok manusia. Dengan demikian, kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia pada dasarnya merupakan karya atau buah budi kelompok manusia Indonesia; yang sekaligus merupakan sistem nilai yang dihayati oleh manusia Indonesia.

Hasil budaya atau kebudayaan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok; yaitu hasil budaya yang dapat dijamah atau disentuh secara fisik (*tangible*) serta hasil budaya yang tidak bisa dijamah atau disentuh secara fisik (*intangible*). Contoh kelompok pertama ialah benda-benda purbakala, rumah adat, istana, benteng kuno, candi, kuil, masjid, gereja, batu ukir, arca, kerajinan tangan, dan sebagainya; sedangkan contoh kelompok kedua adalah adat-istiadat, ilmu pengetahuan, kesenian, sastra, teknologi, hukum, pendidikan, perilaku kolektif, gagasan bersama, dan sebagainya.

Kesenian pada dasarnya merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya yang bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Dengan demikian, kesenian merupakan bagian dari kebudayaan, bukan sebaliknya,

kebudayaan bagian dari kesenian. Ilmu pengetahuan merupakan gagasan vital manusia baik secara individu maupun secara kelompok; sedangkan teknologi merupakan metode untuk merealisasi gagasan vital manusia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi pun merupakan bagian dari kebudayaan.

Di dalam kebudayaan terkandung banyak aspek yang merupakan karya atau buah budi kelompok manusia; termasuk di dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Kebudayaan (*culture*) mempunyai pengertian yang tidak sama dengan peradaban (*civilization*) meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi kebudayaan merupakan kerangka acuan perilaku bagi masyarakat pendukungnya yang berupa nilai-nilai tertentu seperti kebenaran, keindahan, kemanusiaan, kebajikan, dan kemurnian. Sementara itu, peradaban merupakan proses penjabaran nilai-nilai tersebut melalui perwujudan norma-norma yang selanjutnya dijadikan tolok ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat pendukungnya. Secara lebih singkat, penjabaran nilai kebudayaan menjadi norma peradaban sekelompok manusia.

Dari definisi tersebut di atas dapat dibenarkan adanya pernyataan bahwa bangsa yang tidak berbudaya adalah bangsa yang tidak beradab, dan bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang beradab.

Karena akal budi manusia, baik dalam kapasitas individu maupun kelompok, senantiasa berkembang menurut kemampuannya masing-masing, kebudayaan suatu bangsa pun senantiasa berkembang. Kebudayaan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, senantiasa bergerak dinamis baik secara linearik, spiralik, maupun siklik. Tidak pernah ada kebudayaan suatu bangsa itu bersikutat pada ruang dan waktu tertentu, stagnan, atau berhenti di tempat. Apabila di dalam kenyataannya ada kebudayaan yang terkesan

kurang dinamis, hal itu terjadi karena unsur-unsurnya sedang bergerak spiralik atau siklik mengitari para pendukungnya sendiri.

Kebudayaan Indonesia pun mengalami fenomena universal seperti itu. Tidak pernah sesaat pun kebudayaan bangsa Indonesia itu berhenti di tempat atau menjadi stagnan. Bahwa dalam periode tertentu kebudayaan Indonesia terkesan bergerak kurang dinamis, atau justru terkesan mundur, hal itu tidak terlepas dari fenomena universal tersebut di atas.

Dalam era kesejagatan (globalisasi) yang melanda semua bangsa sekarang ini maka informasi yang mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain tidak dapat dibendung atau dibentengi dengan perangkat apapun. Akibatnya, nilai-nilai budaya ataupun pesan-pesan kultural yang terkandung dalam informasi tersebut tidak dapat terelakkan di dalam proses penyebarannya.

Informasi tanpa batas (*borderless information*) justru menjadi jiwa dari proses globalisasi itu sendiri. Dalam situasi yang demikian itu terjadilah proses lintas budaya (*trans-cultural*) dan silang budaya (*cross-cultural*) yang kemudian secara berkelanjutan mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini bangsa yang berketahanan budaya rendah akan mudah larut pada nilai-nilai budaya baru yang ditawarkan dalam pertemuan tersebut, padahal, tidak semua nilai itu senantiasa positif dalam konteks peradaban bangsa. Pada sisi yang lain, bangsa yang berketahanan budaya tinggi memiliki kemampuan yang tinggi pula untuk menyeleksi nilai-nilai budaya baru yang ditawarkan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan nilai-nilai budaya atau kontak budaya (*cultural contact*) dapat menghasilkan dua kemungkinan yang terjadi; yaitu

pertemuan dengan tanpa menghasilkan nilai-nilai baru yang berarti (*assimilation*) dan pertemuan dengan menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna (*aculturalization*).

Agar bisa mengambil manfaat dalam proses pertemuan budaya tersebut, setiap bangsa senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketahanan budaya masyarakatnya. Dengan ketahanan budaya yang memadai, suatu bangsa akan mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyeleksi nilai-nilai budaya baru yang ditawarkan dalam pertemuan antarbudaya.

Kebudayaan Indonesia pun demikian halnya. Dalam mengarungi era kesejagatan sekarang ini tidaklah mungkin kebudayaan Indonesia akan steril dari pengaruh budaya lain. Kebudayaan Indonesia akan bertemu dengan kebudayaan lain di dunia ini, baik dengan kebudayaan yang berasal dari bangsa yang berperadaban tinggi maupun dengan kebudayaan yang berasal dari bangsa yang berperadaban rendah, baik dengan kebudayaan yang berasal dari bangsa yang maju maupun dengan kebudayaan yang berasal dari bangsa yang tertinggal.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi di dalam dua atau tiga dasa warsa terakhir ini telah memacu terjadinya pertemuan antarbudaya. Melalui radio, televisi, internet, komputer, majalah, dan media lain telah memacu terjadinya pertemuan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan-kebudayaan lain.

Posisi geografis Indonesia yang terletak di persimpangan benua dan samodra, serta posisi kultural Indonesia yang terletak di pertengahan antara budaya Barat dan budaya Timur telah menjadikan Indonesia sebagai “jembatan budaya” antara Barat di satu sisi dan Timur di sisi yang lain.

Di dalam posisi yang demikian itu bangsa Indonesia semakin dituntut meningkatkan ketahanan budaya yang dimilikinya. Tanpa adanya usaha peningkatan ketahanan budaya secara memadai, kebudayaan Indonesia bukan saja tidak pernah akan mampu memberi kontribusi dalam pembentukan kebudayaan global, melainkan lebih daripada itu kebudayaan Indonesia akan sangat mudah larut dalam pertemuan antarbudaya.

Pertemuan antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan-kebudayaan lain secara evolutif akan menghasilkan struktur dan sistem masyarakat yang baru; yang sering disebut dengan masyarakat Indonesia baru atau masyarakat madani Indonesia.

Untuk mencapai masyarakat Indonesia baru yang didambakan itu, diperlukan sistem dan metode pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang di dalamnya mengandung strategi dan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia itu sendiri.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah tersebut bisa dirumuskan suatu permasalahan secara umum, yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang didambakan, yaitu masyarakat yang berperilaku sosial secara berbudaya, mempunyai daya respon kultural yang memadai, mempunyai toleransi kultural antarbangsa, berketahanan budaya tinggi, dan mampu memberikan kontribusi di dalam percaturan budaya global.

Secara lebih spesifik permasalahan kebudayaan tersebut di atas dapat diidentifikasi dalam dua pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah sistem dan metode pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang tepat untuk mewujudkan

terbentuknya masyarakat Indonesia baru tersebut?

2. Bagaimanakah strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai peningkatan ketahanan budaya bangsa Indonesia dalam era kesejagatan sekarang ini?

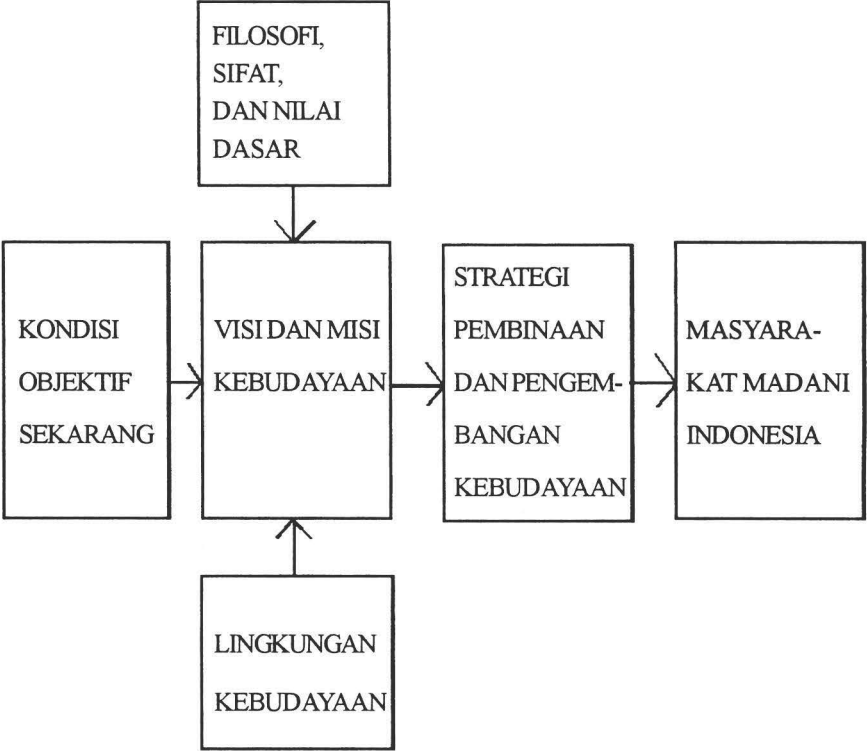
Jawaban atas permasalahan tersebut di atas akan diformulasi menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Masyarakat Indonesia baru hanya dapat dicapai dengan adanya strategi dan kebijakan kebudayaan yang tepat karena apabila strategi dan kebijakannya tidak tepat, tujuan pewujudan masyarakat yang didambakan menjadi sulit dicapai. Pada sisi yang lain di dalam memformulasi strategi dan kebijakan yang tepat harus didasarkan pada visi dan misi kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, strategi dan kebijakan kebudayaan didasarkan pada visi dan misi kebudayaan.

Untuk memformulasi visi dan misi kebudayaan, terlebih dahulu harus ditetapkan filosofi, sifat, dan nilai dasar kebudayaan itu sendiri. Di samping itu, kondisi objektif yang ada di satu sisi dan lingkungan strategis kebudayaan di sisi yang lain perlu mendapatkan perhatian di dalam memformulasi visi dan misi kebudayaan. Jadi, untuk menyusun visi dan misi kebudayaan maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan; yaitu *pertama*, filosofi, sifat, dan nilai dasar kebudayaan, *kedua*, kondisi objektif yang ada sekarang ini, dan *ketiga*, lingkungan strategis kebudayaan itu sendiri.

Kerangka pikir tersebut di atas secara sistematis dapat divisualisasi melalui diagram berikut di bawah ini.



Berdasarkan kerangka pikir tersebut di atas, dokumen pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia ini disusun; yang selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia masa depan, yaitu masyarakat madani Indonesia.

BAB II

FILOSOFI, SIFAT, DAN NILAI DASAR

A. Filosofi Kebudayaan

Untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia tanpa terlepas dari akar-akar budaya bangsa, dipandang perlu mengkaji filosofi kebudayaan nasional. Pengkajian itu dimaksudkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dalam pengembangan kebudayaan Indonesia serta memberikan arah yang jelas dan tepat dalam merumuskan sifat-sifat dan nilai-nilai dasar, visi, misi, strategi, dan kebijakan kebudayaan nasional.

Pada sisi yang lain pengkajian filosofi kebudayaan ini diharapkan mampu mendukung *platform* kebudayaan Indonesia sehingga di dalam perjalanan praktik kebudayaan nasional masa-masa yang akan datang dapat diselamatkan dari adanya kepentingan sepihak oleh kelompok tertentu. Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis-krisis yang lain, termasuk krisis budaya, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk lebih memantapkan *platform* kebudayaan itu sendiri. Terjadinya pergantian milenium yang membawa nilai-nilai peradaban baru juga sangat mendorong terjadinya penguatan *platform* kebudayaan Indonesia.

Pengkajian terhadap filosofi kebudayaan juga dapat mencegah terjadinya kerangka pikir yang bersifat parsial-fragmentaris yang memungkinkan terjadinya ketidaktuntasan, bahkan ketidaktepatan,

di dalam menganalisis dan mencari solusi masalah-masalah budaya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di sisi yang lain, hal itu juga dapat mencegah terjadinya analisis yang supervisial yang dapat berakibat terjadinya kekeliruan atau kekurangpertimbangan argumen yang pada gilirannya dapat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri.

Filosofi kebudayaan akan memberikan manfaat yang berupa arahan bangsa Indonesia pada kerangka pikir yang holistik dalam mengantisipasi berbagai permasalahan budaya yang muncul sehingga upaya pemecahannya dapat dilaksanakan secara lebih utuh.

Secara filosofis pengembangan kebudayaan Indonesia hendaknya diawali dari suatu kepercayaan bahwa manusia yang membangun suatu bangsa itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan menyadari hal itu, pengembangan kebudayaan hendaknya tetap pada garis pengabdian kepada Tuhan dengan memberikan keseimbangan hidup manusia (bangsa) di dunia ini. Dengan ungkapan lain, pengembangan kebudayaan Indonesia hendaknya senantiasa memegang garis keseimbangan antara hubungan horisontal manusia dan manusia pada satu sisi dengan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya di sisi yang lain.

Implementasinya ialah bahwa kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia pada masa mendatang harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keseimbangan tersebut. Masyarakat Indonesia baru haruslah terbangun dari manusia-manusia yang berbudaya dan beradab di mata manusia dan bangsa yang lain serta manusia-manusia yang berbudaya dan beradab di mata Tuhannya.

B. Sifat-Sifat

Dari sisi hasil, kebudayaan merupakan karya atau buah budi sekelompok manusia; sementara itu dari sisi proses kebudayaan merupakan usaha untuk memajukan bertumbuhnya kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan manusia agar dapat menghasilkan karya yang bernilai. Dengan demikian, keberhasilan suatu aktivitas atau pengembangan kebudayaan sangat tergantung pada sejauh mana bertumbuhnya kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan tersebut dapat dicapai secara bersama-sama. Tinggi dan rendahnya pertumbuhan ketiga matra tersebut amat menentukan tingkat keberhasilan proses atau pengembangan kebudayaan bagi manusia Indonesia; di sisi yang lain kebersamaan bertumbuhnya ketiga matra juga menjadi faktor penentu.

Pengembangan kebudayaan harus senantiasa berorientasi dan berpusat kepada manusia secara kolektif (*people centered*); yaitu manusia Indonesia. Pengembangan kebudayaan Indonesia tidak boleh lebih berorientasi dan berpusat pada bangsa lain di luar bangsa Indonesia.

Ketika suatu proses kebudayaan akan dilangsungkan, pertama kali yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang terlibat dalam proses ialah kesiapan manusianya; sejauh mana tingkat kecerdasannya, bagaimana kepribadiannya, dan sejauh mana keterampilan yang dimilikinya. Bahwasanya kesiapan media penting, bahwa kesiapan lingkungan juga sangat penting, dan sebagainya, hal itu memang benar, tetapi semua itu tidak dapat menggeser keutamaan manusianya.

Karena kebudayaan tersebut harus berpusat kepada manusia secara kolektif, pengembangannya harus berpedoman pada

keinginan, gagasan, dan juga kreativitas kelompok manusia itu sendiri. Karena setiap kelompok manusia memiliki kecerdasan dasar, kepribadian dasar, dan keterampilan dasar yang berbeda, maka dalam pengembangannya disesuaikan dengan keinginan, gagasan, dan kreativitas tiap-tiap kelompok manusia tersebut; hanya saja manakala ditemukan keinginan, gagasan dan kreativitas yang tidak konstruktif barulah pembina dan pengembang kebudayaan berhak memberikan bimbingannya.

Secara asasi setiap kelompok manusia itu memiliki hak untuk memajukan pertumbuhan kecerdasannya; serta tidak ada satu pun kekuatan dan kekuasaan di dunia ini yang boleh meniadakan hak tersebut. Secara asasi pula setiap kelompok manusia juga mempunyai hak untuk memajukan pertumbuhan kepribadiannya; serta tak ada satu pun kekuatan dan kekuasaan di dunia ini yang boleh meniadakan hak tersebut. Pada sisi lainnya setiap kelompok manusia mempunyai hak untuk meningkatkan keterampilannya; serta tidak ada satu pun kekuatan dan kekuasaan di dunia ini yang boleh meniadakan hak tersebut. Dengan ungkapan lain, setiap kelompok manusia memiliki hak untuk memajukan pertumbuhan kecerdasan, kepribadian dan keterampilan; dan tidak ada satu pun kekuatan dan kekuasaan di dunia ini yang boleh meniadakan hak tersebut. Oleh karena itu, kebudayaan itu secara universal adalah milik kelompok manusia sebagai pendukungnya; bukan milik pemerintah atau milik kekuatan tertentu yang mendistorsi kepemilikan sekelompok manusia. Kebudayaan adalah milik masyarakat pendukungnya. Hal itu perlu dijadikan pedoman dalam mengembangkan kebudayaan daerah khususnya.

Atas dimilikinya hak kebudayaan oleh setiap kelompok manusia tersebut maka para penyelenggara negara mempunyai

kewajiban membina dan mengembangkan kebudayaan, baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional, untuk warga negaranya itu.

Pada sisi lainnya karena hak untuk memajukan pertumbuhan kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan tersebut bersifat asasi, pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada suatu negara harus dapat dinikmati oleh siapa saja atau kelompok manusia apa saja tanpa memandang berbagai perbedaan antarumat manusia atau antarkelompok manusia, misalnya perbedaan etnis, suku, agama, kelompok, status ekonomi, dan status sosial.

Kebudayaan memiliki tiga sifat yang utama, yaitu menyangkut keterselesaian, ketercepatan, dan ketergantungan. Secara lebih terinci sifat-sifat kebudayaan yang dimaksudkan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama menyangkut keterselesaian proses. Pada dasarnya kebudayaan merupakan proses yang tidak pernah mengenal batas akhir (*never ending process*). Kebudayaan itu yang selalu berproses secara terus-menerus karena tiga matra pendidikan tersebut (kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan) sangatlah dinamis dan tidak mengenal titik puncak. Dengan demikian, proses kebudayaan tidak pernah bisa berhenti sampai sekelompok manusia tersebut mencapai titik puncak yang tidak pernah ada.

Kedua menyangkut ketercepatan proses. Pada dasarnya kebudayaan itu berjalan secara perlahan-lahan (*evolution*) tetapi pasti sebab banyak faktor yang berpengaruh pada budaya manusia, baik yang bersifat internal, seperti "*local genius*" maupun yang bersifat eksternal, yaitu politik, ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan sebagainya, menjadikan jalannya kebudayaan perlahan-lahan; tetapi tidak berarti kebudayaan itu menjadi statis.

Ketiga menyangkut ketergantungan proses. Pada dasarnya keberhasilan atau kegagalan pembinaan dan pengembangan kebudayaan itu sangat tergantung pada masyarakat pendukungnya yang menjadi pemilik kebudayaan itu sendiri; bukan tergantung pada penguasa atau kekuatan-kekuatan yang lainnya.

Sifat-sifat kebudayaan tersebut berkaitan langsung dengan tahap pencapaian keberhasilan proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan itu sendiri. Dengan sifat-sifatnya yang seperti itu dampak kebudayaan pada umumnya tidak mungkin dapat terjadi di dalam waktu yang relatif singkat; pengukuran keberhasilan pun juga tidak mungkin dapat dilihat di dalam kurun waktu yang relatif pendek. Dampak dan pengukuran keberhasilan proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan baru dapat dilakukan setelah menyita waktu yang relatif lama; bukan saja dalam satuan tahun melainkan sangat sering dalam satuan generasi.

C. Nilai-Nilai Dasar

Kebudayaan Indonesia juga mempunyai nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan latar belakang sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam konteks ini terdapat delapan nilai dasar kebudayaan nasional; yaitu menyangkut kemerdekaan, kemajemukan, kejujuran, kebangsaan, keseimbangan, kemandirian, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Secara lebih terinci sifat-sifat kebudayaan yang dimaksud itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama menyangkut kemerdekaan. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi; dengan demikian pengembangan ide, pemikiran, dan kreativitas tidak dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis. Oleh Tuhan, setiap manusia diberikan

kemerdekaan untuk mengembangkan diri dari tahapan '*natuur*' menuju '*cultuur*'. Kemerdekaan untuk mengembangkan diri itulah hakikat kebudayaan. Kebudayaan itu tidak dapat dibatasi oleh tirani kekuasaan, politik, atau kepentingan tertentu.

Kedua menyangkut kemanusiaan. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan haruslah diselenggarakan di atas nilai-nilai kemanusiaan seperti kesopanan, kesantunan, dan keramahan. Nilai-nilai kemanusiaan dapat membuahkan keluhuran budi bagi bangsa Indonesia. Setiap manusia hendaknya berbudi pekerti luhur setelah mengalami proses kebudayaan. Budi pekerti merupakan modal utama guna mengembangkan diri di tengah-tengah percaturan dunia global; tanpa budi pekerti luhur manusia Indonesia tidak akan beradab.

Ketiga menyangkut keadilan. Keadilan merupakan suatu prinsip hidup yang harus dibudayakan pada setiap manusia Indonesia pada khususnya dan manusia di dunia ini pada umumnya. Hidup tanpa keadilan sama saja dengan menanamkan benih-benih kebohongan dan ketidakjujuran, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional maka keadilan sebagai prinsip hidup ini semenjak awal harus terus-menerus ditanamkan kepada manusia Indonesia, baik secara individu maupun kolektif.

Keempat menyangkut kemajemukan. Dalam realitasnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen atau majemuk; terdiri dari aneka suku, beragam etnis, berbeda-beda agama, bermacam-macam kebiasaan, bervariasi status sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Adapun implikasi dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia adalah kemajemukan sebagai nilai dasar ini harus senantiasa diperhitungkan; janganlah

mengambil kebijakan dan keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu dengan merugikan kelompok yang lainnya.

Kelima menyangkut kebangsaan. Secara fundamental kebudayaan itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan yang hakiki. Realitas mengenai terdapatnya perbedaan agama, etnis, suku, adat istiadat, kebiasaan, status sosial, status ekonomi, dan sebagainya, hendaknya justru dapat dijadikan sebagai kerangka dasar dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, pengembangan kebudayaan hendaknya memajukan peradaban bangsa secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat berbagai perbedaan, tanpa harus memaksakan kesamaan di antara perbedaan-perbedaan tersebut.

Keenam menyangkut integritas. Sebagai manusia Indonesia di dalam konteks kebangsaan maka integritas diri sebagai bangsa mutlak diperlukan. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional tidak berhasil apabila tidak dapat menghantarkan manusia Indonesia sampai kepada integritas yang tinggi. Di dalam integritas terkandung sifat-sifat dan kepribadian manusia Indonesia secara kolektif yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan, kesantunan, kejujuran, keramah-tamahan, tanggung jawab, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kebudayaan haruslah mampu mengembangkan sifat-sifat dan kepribadian manusia Indonesia secara positif.

Ketujuh menyangkut demokrasi. Prinsip demokrasi dalam kehidupan merupakan sendi dasar guna mencapai kebahagiaan dan kemajuan bangsa. Keputusan kolektif kelompok manusia Indonesia dalam konteks bangsa haruslah didasarkan pada penghargaan atas pendapat orang lain, penghormatan atas keinginan orang lain, dan kepedulian atas perilaku orang lain sepanjang masih berada

dalam kerangka kepentingan kolektif itu sendiri. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional juga harus didasarkan pada prinsip demokrasi di dalam kehidupan yang merupakan sendi dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan bangsa.

Kedelapan menyangkut kemandirian. Kemandirian itu menjadi dasar bagi segala bentuk usaha dalam pencapaian kemajuan hidup. Kemandirian juga merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Tanpa kemandirian, usaha pencapaian kemajuan hidup sukar membuahkan hasil optimal. Tanpa kemandirian maka sulit bagi bangsa Indonesia untuk menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain. Sudah barang tentu nilai dasar kemandirian ini dalam pelaksanaannya tidak harus dilewati dengan meniadakan kerja sama dengan kelompok lain karena dalam banyak hal kerja sama itu merupakan kata kunci keberhasilan.

Kesembilan menyangkut religiusitas. Bangsa Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai bangsa yang beragama dengan berbagai agama yang dianut oleh manusia Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kebudayaan hendaknya bisa menjadikan setiap manusia Indonesia sebagai manusia yang mempunyai religiusitas atau kesalehan berperilaku yang didasarkan pada ajaran agama yang dianutnya. Dengan kesalehan berperilaku inilah bangsa Indonesia dikembangkan secara lebih beradab.

Kesepuluh menyangkut keseimbangan. Kebudayaan hendaknya bisa memberikan keseimbangan di dalam upaya memajukan bertumbuhnya kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan pendukungnya. Kebudayaan yang hanya mengedepankan

bertumbuhnya kecerdasan akan menghasilkan manusia yang tidak sehat raga-jiwanya. Kebudayaan yang hanya mengedepankan bertumbuhnya kepribadian akan menghasilkan manusia yang tertinggal. Sementara itu, kebudayaan yang hanya mengedepankan peningkatan keterampilan hanya menghasilkan manusia robot. Di sinilah keseimbangan diperlukan.

Kesebelas menyangkut kebersamaan. Dahsyatnya perkembangan ilmu dan teknologi (iptek) yang melanda dunia dalam beberapa dasa warsa terakhir ini secara langsung ataupun tidak langsung ternyata menumbuhkan sikap individualistik dan berkurangnya rasa kebersamaan pada diri manusia. Padahal, rasa kebersamaan itu justru makin diperlukan untuk memecahkan problematika kehidupan individual dan kolektif. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kebudayaan hendaknya dapat menumbuhkan rasa kebersamaan manusia Indonesia.

Keduabelas menyangkut kesetaraan. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional hendaknya didasarkan pada prinsip kesetaraan antara budaya daerah (lokal), budaya nasional, dengan budaya manca (global). Pembinaan kebudayaan hendaknya memang dititikberatkan pada budaya daerah dan budaya nasional. Meskipun demikian, dalam pengembangan kebudayaan hendaknya prinsip kesetaraan tersebut benar-benar bisa dilakukan, yaitu dengan metode mengakulturasi budaya daerah yang merupakan budaya asli Indonesia dengan budaya manca yang memperkaya khasanah kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri.

BAB III

LINGKUNGAN DAN KONDISI KEBUDAYAAN

A. Tingkat Lingkungan

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional sekarang dan masa mendatang merupakan agenda yang sangat mendesak dan menentukan, bukan hanya dari sudut kebudayaan nasional itu sendiri melainkan juga dari perspektif eksistensi negara-bangsa (*nation state*) Indonesia. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa seluruh aspek kehidupan negara-bangsa Indonesia, termasuk kebudayaan nasional, sedang mengalami perubahan yang cepat serta berdampak jangka panjang, yang sangat menentukan masa depan kebudayaan nasional dan negara-bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Secara internal, perubahan itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa dielakkan dari perubahan-perubahan politik yang terjadi setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan Orde Baru pada bulan Mei 1998. Pergantian kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie yang berkuasa sekitar 15 bulan, yang kemudian digantikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid sebagai hasil Pemilu 1999, merupakan masa transisi yang krusial bagi Indonesia dalam menuju demokrasi.

Secara eksternal, proses globalisasi juga semakin meningkat intensitasnya. Globalisasi dewasa ini bukan lagi sekedar ditandai meluasnya penggunaan telekomunikasi, tetapi juga kian meningkatnya penyebaran budaya asing yang mengglobal ke dalam masya-

rakat Indonesia. Penetrasi dan penyebaran budaya global sedikit banyak telah dan akan mempengaruhi budaya nasional.

Pembahasan tentang lingkungan strategis dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dapat didekati pada tiga tingkat; yaitu lingkungan nasional yang mencakup lingkungan lokal di berbagai wilayah Indonesia, lingkungan regional di wilayah Asia Tenggara, dan lingkungan global. Lingkungan strategis pada ketiga tingkat itu mencakup berbagai aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, agama, dan sebagainya.

B. Lingkungan sebagai Tantangan

Lingkungan strategis nasional dan lokal mengalami perubahan yang cepat dan berdampak luas dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah perubahan itu muncul dan berkembang kondisi yang kondusif bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Namun, pada saat ini sama juga masih bertahan kondisi yang tidak menguntungkan. Kesemua itu harus diantisipasi dalam perumusan strategi dan implementasi pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Beberapa bidang yang secara kondusif berpengaruh dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional adalah sebagai berikut.

1. Bidang Politik

Politik merupakan bidang kehidupan yang mengalami perubahan sangat dramatis, cepat, dan berdampak luas di tingkat nasional dan lokal. Perubahan itu bermula dengan tumbanganya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, yang kemudian digantikan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang terpilih dalam SU MPR 20 Oktober 1999.

Perubahan di bidang ini tidak hanya berupa pergantian dan suksesi kepemimpinan nasional, tetapi lebih penting ialah perubahan di berbagai aspek kehidupan politik lainnya. Semua perubahan tersebut sebagai langkah reformasi politik nasional dan lokal.

Reformasi dan perubahan politik yang telah, sedang, dan akan berlangsung pada tahun-tahun mendatang secara umum bertitik tolak pada upaya penciptaan Indonesia yang lebih demokratis dan lebih madani. Perubahan dan reformasi ke arah Indonesia yang lebih demokratis dan madani itu telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang melancarkan sejumlah kebijakan seperti pemberian kebebasan pers dan media informasi, penerapan sistem multipartai, penerimaan dan penetapan sejumlah undang-undang, pelaksanaan Pemilu 1999 yang diakui banyak pihak sebagai Pemilu yang paling demokratis selama Indonesia merdeka penerimaan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan pengembalian militer (TNI) kepada fungsi semula sebagai institusi pertahanan dan keamanan.

Masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam beberapa waktu lalu dan waktu-waktu sesudahnya dapat dikatakan sebagai masa transisi Indonesia menuju demokrasi yang lebih *genuine* dan otentik. Reformasi politik Indonesia mencakup tiga bidang besar: *pertama*, reformasi konstitusional sistem dan praksis politik yang selaras dan mendukung demokrasi; *kedua*, reformasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik, pemerintahan, dan birokrasi termasuk MPR, DPR, parpol, dan organisasi-organisasi masyarakat madani sehingga kondusif bagi pertumbuhan demokrasi; dan *ketiga*, reformasi budaya politik (*political culture*), dari budaya patrimonialistik dan feodalistik kepada budaya demokratis egaliter dan transparan.

Dalam kerangka reformasi politik tersebut, perlu diantisipasi pula dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Momentum bagi otonomisasi dan desentralisasi kelihatan tidak dapat dimundurkan lagi. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi adalah kemunculan semangat primordialisme dan egoisme politik lokal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

2. Bidang Ekonomi

Perkembangan ekonomi Indonesia semenjak pertengahan 1997 menunjukkan kerapuhan di dalam fondasi dan struktur. Akibatnya, ekonomi Indonesia tidak sanggup menghadapi krisis moneter berikut krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Pasifik sejak waktu itu. Krisis ekonomi yang terjadi tidak hanya menimbulkan kebangkrutan berbagai sektor formal, tetapi juga mendorong krisis dalam sistem keuangan dan perbankan. Nilai rupiah yang mengalami kemerosotan drastis terhadap valuta asing membuat merosotnya secara drastis pendapatan perkapita (GNP) dari US\$ 1.080 miliar pada 1997 menjadi US\$ 380 miliar pada 1998.

Lebih jauh lagi, krisis, dan kemerosotan ekonomi Indonesia tidak saja menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah *"little tiger"* atau *"young tiger"* Asia, tetapi mungkin tidak lebih dari *"paper tiger"*, macan kertas yang tidak berdaya apa-apa menghadapi perubahan dan tantangan yang datang dari luar.

Krisis ekonomi tersebut sekaligus mengungkapkan kekeliruan strategi pengembangan ekonomi yang bertumpu pada industri padat modal dan sektor formal lain, yang terbukti sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan keuangan pada tingkat global.

Krisis dan kerapuhan ekonomi Indonesia berdampak sangat luas pada kehidupan dan perkembangan kebudayaan. Krisis ekonomi Indonesia tidak hanya meningkatkan jumlah para penganggur dan rakyat miskin, tetapi sekaligus juga merontokkan “kelas menengah” (*middle class*) yang tengah terbentuk dalam beberapa tahun sebelum terjadinya krisis ekonomi. Kehancuran, atau sedikitnya kemerosotan kelas menengah, yang merupakan salah satu segmen yang paling dinamik dari masyarakat Indonesia, tentu mempunyai dampak negatif tertentu pada pertumbuhan kebudayaan Indonesia.

Pada segmen lain, pada masyarakat lapis bawah (*lower class*) dan miskin (*poor*), akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah terjadi peningkatan kerapuhan keadaban (*civility*) yang merupakan salah satu pilar kebudayaan yang *civilized*. Konkretnya ialah adanya kecenderungan semakin meningkatnya patologi sosial yang berupa aksi-aksi atau tindakan main hakim sendiri dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya.

Mengingat besarnya pengaruh dan keterkaitan perkembangan kebudayaan dengan kondisi ekonomi, perlu dirumuskan kembali strategi pengembangan ekonomi Indonesia. Strategi pengembangan ekonomi yang diambil hendaknya memberi prioritas kepada ekonomi yang berbasis pada masyarakat lapisan bawah, baik pertanian, agrobisnis dan sektor informal yang justru menyerap banyak tenaga kerja. Pemberian prioritas pada penguatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak berarti mengabaikan industri dan sektor-sektor riil dan formal lainnya. Seluruh bidang dan sektor ekonomi ini bisa dan dapat dikembangkan secara bersama atau simultan.

3. Bidang Sosial

Kepincangan yang terjadi dalam bidang ekonomi dapat juga disaksikan dalam kehidupan sosial-budaya berbagai lapisan masyarakat dan warga negara Indonesia. Kepincangan kondisi serta perkembangan sosial-budaya itu terlihat dalam berbagai level budaya, antara satu provinsi dan provinsi lain, antara satu kelompok etnis dan kelompok etnis lain, dan sebagainya.

Pada level kondisi dan perkembangannya, kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia menghadapi kesenjangan. Sebagian masyarakat Indonesia, seperti di Papua dan sejumlah tempat terpencil, masih ada dalam kehidupan sosial-budaya yang berkeadaban. Sebagian masyarakat Indonesia lainnya, dan ini yang paling besar jumlahnya, sudah dan masih berada dalam tahap kehidupan sosial-budaya agraris. Dari sudut perkembangan sosial-budaya, lapisan masyarakat inilah yang paling dominan dan konstan, tidak terlalu banyak mengalami kemajuan, karena tidak terjadi proses mekanisasi yang, tentu saja, melibatkan perubahan cara pandang (*worldview*). Sebaliknya, yang terjadi adalah involusi kehidupan yang tidak kondusif bagi kemajuan kehidupan sosial-budaya.

Bagian terkecil masyarakat Indonesia, dan kelompok masyarakat ini jumlahnya relatif sangat sedikit, sudah berada di dalam tahap kehidupan sosial-budaya industri, dan bahkan jasa (*service*) dengan menggunakan produk kemajuan teknologi mutakhir. Segmen masyarakat Indonesia seperti ini terutama terdapat di kota-kota besar, khususnya di Jakarta.

Kepincangan tahap kehidupan sosial-budaya seperti diuraikan tersebut di atas semakin rumit dengan meningkatnya polarisasi budaya, antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya.

Dalam kepincangan ini, terjadilah proses homogenisasi budaya wilayah-wilayah pusat, seperti Jakarta dengan budaya metropolitan atau kosmopolitan yang sangat cenderung materialistik, hedonistik, dan permisif. Pada segi lain, juga terjadi peningkatan dominasi budaya Jawa berkat kuatnya pengaruh elit Jawa dalam kehidupan sosial dan politik. Hal itu terlihat bukan hanya dalam dominannya budaya politik patrimonialistik dan feodalistik, tetapi juga dalam meluasnya penggunaan istilah-istilah Jawa Kuno (Sanskerta) sebagai nama-nama gedung, misalnya *Manggala Wanabakti*, nama-nama momentum, misalnya *Paripurna*, nama-nama penghargaan, misalnya *Parasamya*, dan sebagainya.

Dengan perkembangan seperti itu, tidak mengherankan kalau kemudian muncul tuntutan-tuntutan untuk pemberian ruang lebih besar bagi ekspresi budaya lokal yang begitu beragam di Indonesia. Dengan demikian, budaya Indonesia tetap dapat berkembang dalam kebinekaan dan penekanan yang berlebihan pada keikaan hanya akan merugikan kebinekaan budaya bangsa Indonesia.

4. Bidang Pendidikan

Tak diragukan lagi, pendidikan sebagai upaya paling utama untuk pencerdasan kehidupan bangsa merupakan modal dasar bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Hanya dengan pendidikan yang bermutu, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transisi menuju demokrasi; dan hanya dengan pendidikan yang bermutu pula, Indonesia dapat membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan global.

Kenyataannya kondisi pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan. Pendidikan Indonesia tidak hanya masih rendah mutunya, tetapi juga secara kuantitas masih belum memadai. Meski peme-

rintah pada masa Orde Baru relatif berhasil meratakan kesempatan belajar, adanya krisis ekonomi mengakibatkan semakin banyak anak yang tidak mampu memperoleh pendidikan, dan makin banyak pula yang terpaksa mengalami putus sekolah (*drop-out*).

Berbagai kelemahan mutu pendidikan secara umum bersumber pada dua masalah pokok. *Pertama*, dalam tiga dasawarsa terakhir, kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM dilakukan secara sangat sentralistik. Kebijakan homogenisasi dan penyeragaman pendidikan telah mengakibatkan anak didik tercerabut dari akar budaya dan lingkungan sosialnya. Lebih jauh lagi, penyeragaman mengakibatkan pendidikan kehilangan makna fungsionalnya; peserta didik mengalami apa yang disebut buta huruf fungsional (*functional illiteracy*). *Kedua*, proses-proses pendidikan yang berlangsung selama ini lebih menekankan kepada pengembangan ranah kognitif peserta didik, dan sebaliknya sangat cenderung mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik. Akibatnya, sekolah lebih berfungsi sebagai tempat pengajaran daripada pendidikan. Sekolah gagal membentuk peserta didik yang memiliki karakter dan kepribadian. Hasilnya, sekolah cenderung hanya menghasilkan manusia Indonesia yang mengalami kepribadian yang terbelah (*split personality*) dengan segala implikasi dan dampak negatifnya dalam kehidupan individual dan sosial.

Berbagai upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut telah dilakukan dari waktu ke waktu melalui upaya-upaya inovasi. Akan tetapi, gagasan dan upaya inovasi tersebut sering terlihat bersifat sporadis dan temporer. Cukup banyak gagasan inovatif yang telah dilaksanakan dengan dana yang cukup besar, tetapi pada akhirnya gagal dalam membenahi dan sekaligus meningkatkan mutu pendi-

dikan. Sebab itu, dalam konteks pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pendidikan haruslah dipandang sebagai salah satu unsur pokok dalam pembentukan Indonesia yang lebih demokratis dan madani. Dalam kaitan itu perlu dirumuskan platform pendidikan dan pengembangan SDM baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang menuju terbentuknya masyarakat madani; suatu bentuk masyarakat yang terdiri dari ikatan individu-individu yang beriman, berakhlak mulia, cakap dan cerdas, demokratis, bertanggung jawab, dan berwawasan budaya.

5. Bidang Hukum dan Keamanan

Kondisi hukum Indonesia sejak awal kemerdekaan masih jauh dari yang diharapkan. Secara umum masih banyak bagian ketentuan hukum Indonesia yang merupakan warisan dari kolonialisme Belanda. Upaya untuk membangun sistem hukum nasional yang utuh, lengkap, dan komprehensif masih menghadapi kendala. Oleh karena itulah, pembangunan dan perumusan sistem hukum nasional itu masih bersifat parsial dan *ad-hoc*, dan sebab itu pula masih terdapat ketentuan hukum dan perundangan yang belum selaras dan bertentangan satu sama lain. Di sisi lain, perkembangan yang cepat di tingkat internasional khususnya dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi, dan HAM belum mampu direspon secara tepat dan memadai.

Dalam konteks di atas, yang dapat dilakukan bukan hanya ratifikasi terhadap ketentuan dan kesepakatan hukum internasional, melainkan seharusnya juga perumusan yang juga kontekstual dengan lingkungan nasional.

Pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 30-an tahun di Indonesia dirasa kurang mampu memberikan respon dan perhatian

yang memadai terhadap perkembangan- perkembangan pada tingkat nasional dan internasional yang memerlukan ketentuan dan kapasitas hukum. Sesungguhnya usaha-usaha yang cukup signifikan telah dilakukan pemerintahan Presiden B.J. Habibie dengan mengundang berbagai ketentuan hukum, meskipun demikian perumusan berbagai ketentuan itu dilakukan secara tergesa-gesa sehingga tetap saja terkesan parsial dan *ad hoc*.

Kenyataan tersebut sudah barang tentu turut mempengaruhi pemberdayaan hukum (*law enforcement*). Pemberdayaan hukum di Indonesia bukan hanya menghadapi kendala kelemahan sistem hukum dan perundangan, tetapi juga karena terdapatnya masalah-masalah berat yang dihadapi oleh institusi-institusi penegakan hukum, dan bahkan aparat hukum itu sendiri. Institusi-institusi hukum seperti Mahkamah Agung (MA) masih belum bisa independen dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan eksekutif sehingga tidak dapat mandiri, objektif dan adil dalam menegakkan hukum. Begitu juga, aparat hukum seperti polisi juga mengalami krisis integritas dan kredibilitas sehingga hukum seolah-olah untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan.

Dalam pada itu, aparat keamanan (ABRI atau TNI dan Polri) lebih tertarik dan terseret ke dalam pergulatan politik sehingga cenderung mengabaikan penegakan hukum. ABRI bahkan menjadi salah satu faktor penting bagi kemerosotan penegakan hukum. Dalam masa setelah jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, TNI dan Polri mengalami krisis otoritas dan demoralisasi sehingga terjadi peningkatan signifikan dalam tindakan-tindakan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, upaya mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsi dasarnya sebagai aparat keamanan dan penegakan hukum seharusnya

dilaksanakan terus secara konsisten.

6. Bidang Agama

Agama merupakan salah satu pilar terpenting dalam pembentukan masyarakat madani atau masyarakat yang berkeadaban. Posisi penting dan strategis agama ini telah dikukuhkan dalam UUD 1945 dan Pancasila yang telah menjadikan prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama. Selanjutnya, posisi penting dan strategis agama ini ditegaskan kembali dari waktu ke waktu, misalnya dengan menjadikan agama sebagai sumber etik dan moral dalam pembangunan, atau menjadikan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan rohani sebagai tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Kenyataan seperti itulah yang kelihatan mendorong terjadinya kesemarakkan kehidupan keagamaan pada masa Orde Baru, khususnya semenjak awal dasawarsa 80-an. Perkembangan ini dapat dilihat dengan pertumbuhan jumlah rumah ibadah, peningkatan jumlah jemaah haji, dan kesemarakkan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan ritual agama. Meskipun demikian, harus diakui bahwa peningkatan kesemarakkan kehidupan beragama itu masih bersifat lahiriah, formal, atau simbolis. Belum terjadi peningkatan kedalaman dan substansi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan atau diskrepansi antara kesalahan keagamaan yang bersifat formal dan personal dengan kesalahan sosial dan komunal. Karena itulah sangat ironis, jika warga masyarakat semakin rajin menjalankan ibadah dan ritual keagamaan, tetapi pada saat yang sama juga terjadi peningkatan perubahan korup yang melanggar ajaran agama itu sendiri.

Pada segi lain agama makin sering terkait dengan kekerasan dan kerusuhan sosial yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya, khususnya sejak 1997. Berbagai kerusuhan melibatkan umat beragama, yang menghasilkan perusakan dan penghancuran rumah-rumah ibadah, dan saling bunuh di antara kelompok umat beragama yang berbeda, semakin sering terjadi, dan semakin sulit diselesaikan. Hal ini paling jelas terlihat di Ambon atau Maluku secara keseluruhan.

Perbedaan dan pertikaian antarumat beragama jelas bukanlah satu-satunya faktor atau motif ekonomi dan politik bahkan dapat dikatakan merupakan sumber pertama dan utama konflik dan kekerasan antarumat beragama. Faktor dan motif agama muncul belakangan sebagai *rallying point* dan justifikasi atas tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian dan prioritas khusus. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama perlu meninjau ulang berbagai kebijakan yang berkenaan dengan umat beragama; dan pada saat yang bersamaan secara internal umat beragama seyogianya melakukan evaluasi dan *self criticism*, misalnya terhadap aktivitas keagamaan, seperti dakwah atau misi penyebaran agama dan sebagainya. Demikian pula, dialog-dialog antarumat beragama seharusnya tidak lagi sekedar formalitas dan basa-basi, tetapi lebih substantif dan fungsional.

7. Bidang Ekologi

Lingkungan ekologi pada esensinya tidak hanya menyangkut ekosistem, tetapi juga lingkungan hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembicaraan tentang ekologi tidak boleh hanya mencakup subjek mengenai pelestarian ekosistem, flora dan fauna,

tetapi sekaligus juga tentang lingkungan hidup manusia dengan berbagai aspeknya.

Sekarang ini Indonesia merupakan salah satu lingkungan ekologi yang sedang mengalami kerusakan cukup parah. Keseimbangan dan kelestarian alam terganggu akibat terus berlangsungnya pembabatan hutan dan perburuan hewan. Tak kurang parahnya, jutaan hektar hutan terbakar setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan yang bukan hanya merusak ekosistem, melainkan juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan manusia dan sekaligus bahaya terhadap transportasi, khususnya penerbangan. Selain itu, eksploitasi sumber-sumber alam (*natural resources*) yang cenderung sangat semena-mena tidak hanya menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan hidup, tetapi juga krisis sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

Realitas tersebut dapat dilihat dari protes dan demonstrasi massa terhadap berbagai pabrik dan proyek yang dianggap merusak lingkungan; misalnya demonstrasi terhadap aktivitas pabrik kertas RT Indorayon yang merusak lingkungan hidup Danau Toba serta penambangan tembaga dan emas PT Freeport di Timika. Ketidakpuasan masyarakat lokal itu terjadi bukan hanya karena rusaknya lingkungan hidup di sekitar mereka, melainkan juga karena mereka hampir tidak memperoleh manfaat ekonomis dan sosial apa-apa dari usaha eksploitasi alam tersebut.

Semua krisis ekologi dan sosial-ekonomi tersebut tidak lain disebabkan penyelewengan dari filsafat dan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Padahal, seharusnya pembangunan berwawasan lingkungan tunduk kepada pertimbangan yang logis, rasional, dan berorientasi kepada penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup daripada pertimbangan ekonomis dan bisnis semata-

mata. Sikap dan kebijakan pemerintah yang selama ini cenderung berpihak hanya kepada kepentingan investor dan sebaliknya terkesan menutup mata terhadap kepentingan masyarakat setempat sudah sepatutnya direformasi.

C. Kondisi Berkebudayaan

Situasi lingkungan sebagai tantangan dalam berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah, sedang, dan akan mempengaruhi kondisi berkebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Situasi lingkungan pada masing-masing bidang, dalam batas tertentu, bahkan kelihatan kurang kondusif bagi kondisi berkebudayaan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Secara internal pada tingkat nasional, sejak akhir 1970-an para pengamat budaya dan budayawan telah mensinyalir terdapatnya fenomena semakin meluasnya penyakit-penyakit budaya. Secara eksplisit budayawan Mochtar Lubis, misalnya, menyatakan bahwa budaya Indonesia sedang sakit. Kondisi berkebudayaan yang sakit itu menghinggapi dan bahkan cenderung menjadi epidemi yang menjangkiti semakin banyak lapisan masyarakat Indonesia.

Pada kelompok generasi muda, seperti pemuda, mahasiswa dan remaja, terlihat semakin kuat adanya budaya “menerobos”, cepat puas dan mentalitas instan (*instant mentality*). Sebaliknya, budaya, disiplin dan budaya kerja keras cenderung semakin merosot, hal itu tidak saja terlihat pada organisasi pemuda dan mahasiswa, tetapi juga di kalangan remaja. Lebih parah lagi, patologi sosial di kalangan mereka juga semakin merebak, dengan kian seringnya tawuran di antara sesama kaum pelajar, mahasiswa, dan pemuda; berbarengan dengan semakin meluasnya penyalah-

gunaan narkoba dan gaya hidup yang serba permissif.

Dalam skala lebih luas, pada banyak kalangan masyarakat, penyakit- penyakit budaya juga semakin meluas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hampir di seluruh sektor birokrasi; sementara ketidakadilan ekonomi dan sosial semakin meluas bagaikan wabah kanker yang menggerogoti seluruh urat nadi dan tulang masyarakat. Akibatnya, terjadilah pembusukan (*decay*) politik dan sosial yang meruyak dan terungkap jelas setelah jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Jatuhnya kekuasaan yang telah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa itu ibarat membuka “kotak pandora” (*pandora box*) yang mengeluarkan semua penyakit dan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Berbarengan dengan hal itu, globalisasi yang semakin intens sejak dasawarsa 1990-an hanya menambah sakitnya kondisi berkebudayaan Indonesia. Banyak kalangan masyarakat melihat dan mengambil globalisasi bukan pada aspek positifnya, yakni peningkatan penguasaan sains dan teknologi. Sebaliknya, yang diadopsi adalah gaya hidup global seperti hedonisme, permisivisme, dan konsumerisme. Keadaan seperti ini tidak bisa lain hanya membuat semakin rentannya budaya bangsa.

Seluruh gambaran kondisi berkebudayaan yang tidak kondusif itu, mencerminkan kegagalan bangsa di dalam mengembangkan strategi kebudayaan yang tepat. Kebijakan penguasa Orde Baru yang menerapkan developmentalisme yang bertumpu pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak dapat memberikan ruang yang memadai bagi pertumbuhan kondisi berkebudayaan yang kondusif. Sebaliknya, kebijakan penguasa Orde Baru yang menerapkan developmentalisme yang bertumpu pada

stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi justru meminggirkan pembangunan kebudayaan yang sangat penting itu. Akibatnya, *nation and character building* tidak lagi menjadi subjek dan program pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kondisi berkebudayaan Indonesia sangat rentan dan rapuh.

BAB IV

VISI DAN MISI

A. Visi Kebudayaan

Filosofi kebudayaan, sifat-sifat kebudayaan, dan nilai-nilai dasar kebudayaan yang sesuai dengan latar belakang sosial masyarakat Indonesia merupakan fondasi dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, apapun bentuk dan cara pengembangan kebudayaan akan senantiasa bertumpu pada filosofi, sifat-sifat, dan nilai-nilai dasar kebudayaan tersebut. Berdasarkan filosofi, sifat-sifat, dan nilai-nilai dasar kebudayaan serta lingkungan dan kondisi kebudayaan itulah selanjutnya misi dan visi kebudayaan dirumuskan.

Visi kebudayaan Indonesia adalah terwujudnya kebudayaan dan peradaban Indonesia yang berjiwa Pancasila, maju, dinamis, dan demokratis sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersatu serta mempunyai jati diri yang kukuh di tengah-tengah kehidupan antarbangsa dan tantangan sistem global.

Kebudayaan dan peradaban Indonesia tersebut hendaknya dapat dicerminkan dalam kebudayaan Indonesia masa depan atau masyarakat madani Indonesia. Ihwal masyarakat madani dikemukakan pada Bab V.

Kebersatuan bangsa Indonesia yang dijalin dengan semangat “Bhineka Tunggal Ika” merupakan salah satu unsur keberadaban masyarakat Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari

berbagai suku dan etnis, berbagai keyakinan dan agama, beraneka kebiasaan dan budaya, berbeda latar belakang sosial dan pendidikan, pada dasarnya satu juga. Keberbagaian, keanekaan, dan perbedaan tersebut justru dapat menjadi perekat kebersatuan masyarakat Indonesia.

B. Misi Kebudayaan

Misi kebudayaan Indonesia secara umum adalah memajukan dan mengembangkan kebudayaan bangsa, sedangkan secara khusus misi kebudayaan Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Membina kebudayaan bangsa sebagai upaya untuk mencapai kemajuan adab, budaya, persatuan bangsa, memperkaya, dan memperkembangkan kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan kebudayaan bangsa sebagai upaya perluasan, pendalaman, dan peningkatan mutu kebudayaan bangsa.
3. Melindungi kebudayaan bangsa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kemusnahan kebudayaan bangsa.
4. Memanfaatkan kebudayaan sebagai upaya penggunaan kebudayaan bangsa untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

BAB V

KEBUDAYAAN INDONESIA MASA DEPAN: MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Wujud kebudayaan Indonesia pada masa depan yang diinginkan masyarakat Indonesia setelah reformasi ialah masyarakat madani yang memiliki ciri keindonesiaan. Untuk itu perlu dikemukakan dahulu pengertian masyarakat madani di bawah ini.

Terjadinya pergeseran kekuasaan dari Orde Baru ke orde reformasi sekarang ini ternyata menimbulkan banyak peristiwa politik, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Banyak orang mengira bahwa peristiwa politik harian atau jangka pendek merupakan satu-satunya kekuatan yang menentukan sejarah. Seolah-olah sejarah ditentukan oleh interaksi sehari-hari antara lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan judikatif. Padahal, kejadian sesungguhnya sama sekali tidak demikian. Yang menentukan sejarah bukanlah peristiwa harian, melainkan yang ada di bawahnya, yaitu sejarah jangka menengah atau *conjuncture* seperti demografi, mobilitas sosial, dan mobilitas budaya, serta sejarah jangka panjang atau *struktural* atau *longue duree* seperti iklim, geografi, lingkungan alam.

Dinamika kebudayaan, dalam arti perubahan cara berpikir dan perubahan budaya politik, termasuk *conjuncture*, itulah yang ikut menentukan perubahan sejarah. Dengan demikian, dalam membicarakan kebudayaan sebagai faktor dalam pembentukan

masyarakat madani (*civil society*), kita harus “melupakan” peristiwa politik jangka pendek dan juga sejarah jangka panjang.

Bangsa Indonesia perlu mempunyai pandangan mengenai masa depannya sendiri. Kiranya setelah peristiwa 1998, terbentuknya masyarakat madani telah menjadi konsensus nasional. Sebagai masyarakat semiagraris, usaha ke arah terwujudnya masyarakat madani berarti bahwa masyarakat akan mengalami loncatan kebudayaan. Biasanya suatu masyarakat sudah mengalami industrialisasi dan pertarungan ideologi terlebih dulu seperti negara-negara Eropa Timur dan Rusia yang menyaksikan kegagalan ideologi Marxisme, baru kemudian menoleh pada konsep masyarakat madani yang non-ideologis.

Setiap loncatan kebudayaan itu ada presedennya. RRC juga mengalami loncatan kebudayaan ketika mengadopsi komunisme tanpa terlebih dahulu mengalami industrialisasi. Dari sebuah feodalisme ala *Asian mode of production* dengan pertentangan antara tuan tanah versus petani langsung mengalami kolektivisme Komunis tanpa melalui tahapan masyarakat borjuis dengan pertentangan antara borjuasi versus proletariat. Loncatan kebudayaan itu harus disadari oleh para perencana masyarakat madani di Indonesia agar sosialisasinya berjalan secara lebih intensif.

Istilah masyarakat madani memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pada abad ke-16 istilah itu dipakai untuk menyebut masyarakat yang menerapkan hukum dan hak-hak sipil. Sejarawan humanis Adam Ferguson menulis buku sosiologi historis, '*An Essay on the History of Civil Society*' (1765) yang merupakan sebuah interpretasi sejarah tentang institusi kemasyarakatan. Dia menyaksikan pergantian masyarakat feodal ke masyarakat

komersial. Dari melihat bagaimana para kesatria yang jagoan berperang digantikan oleh pedagang yang tidak senang berperang dan bagaimana masyarakat militer digantikan oleh masyarakat sipil. Dalam masyarakat baru itu ada pergantian kerja yang jelas: ada pedagang, ada politisi, ada tentara. Karena masyarakatnya adalah masyarakat komersial, mereka yang bergerak dalam perdagangan berada di atas. Pengalaman dengan zaman itulah yang kemudian oleh Gellner diekspresikannya dalam buku sejarah masyarakat sipil. Selanjutnya, Krader berpendapat bahwa masyarakat madani selalu ada di dalam masyarakat berkelas (*class-divided society*), baik dalam masyarakat dengan *Asian mode of production*, masyarakat feodal maupun masyarakat borjuis.

Di Eropa semenjak abad ke-19 ada dua varian dari konsep masyarakat madani yang saling berseberangan, yaitu tradisi Hegel dan tradisi Marx. Persoalan utama pertikaiannya ialah ihwal peranan negara. Bagi Hegel negara adalah penyelenggara nilai-nilai keadilan dan etik, sedangkan bagi Marx negara adalah alat eksploitasi dan resepsi yang harus dilenyapkan. Ketika Marxisme gagal melenyapkan negara-negara Eropa Timur serta Rusia, dan sebaliknya negara malah menjadi mesin penindas warganya maka sejak 1989 orang pun mempunyai pengertian tersendiri tentang masyarakat madani.

Sejak tahun 1989 itu masyarakat madani dipahami sebagai suatu masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi nonpemerintah yang kuat untuk mengimbangi negara. Di sana masyarakat madani menjadi idaman bagi orang yang kecewa dengan negara sosialis. Jadi, masyarakat madani disamakan dengan demokrasi, pluralisme, dan masyarakat terbuka. Hegelian yang memuja negara dan Marxian yang menista negara ditolak, menggantikannya dengan masyarakat madani.

B. Masyarakat Madani Indonesia

Di Indonesia pengertian masyarakat madani sudah dikenal melalui forum-forum diskusi sejak akhir 1980-an. Pada waktu itu para pendukung demokrasi mengeluhkan menguatnya militer, negara, birokrasi, Golkar, dan ideologi resmi. Istilah masyarakat madani pun semakin populer dan menjadi kata kunci bagi gerakan pro-demokrasi.

Di dalam Festival Istiqlal II tahun 1995, Anwar Ibrahim yang waktu itu Deputy Perdana Menteri Malaysia, memperkenalkan terjemahan masyarakat madani untuk *civil society*. Masyarakat jenis itu kemudian memperoleh momentumnya sejak jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Presiden B.J. Habibie membentuk tim kenegaraan untuk merumuskan gagasan masyarakat madani. Gagasan ini dilanjutkan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid meski tanpa retorika. Adanya keinginan dan usaha untuk meniadakan supremasi militer atas sipil yang selama ini terjadi di Indonesia serta adanya keinginan dan usaha menegakkan supremasi hukum dan pengadilan HAM merupakan indikator ke arah terwujudnya masyarakat madani.

Masyarakat Madani Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang dibentuk oleh sejarah bangsa, kemajemukan masyarakat, ideologi nasional, dan lingkungan budaya. Adapun ciri-ciri itu adalah (1) religius dan berbudi luhur, (2) adil dan sejahtera, (3) demokratis dan toleran, (4) mandiri dan bertanggung jawab, (5) tertib dan teratur, (6) setara dan berkebersamaan, (7) berintegritas dan berketangguhan budaya, serta (8) dinamis dan berorientasi ke depan.

1. Religius dan Berbudi Luhur

Ciri religius adalah konsekuensi logis dari sila pertama Pancasila,

Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa, baik yang berbentuk agama yang terlembaga, kepercayaan kolektif maupun kepercayaan perorangan, senantiasa berarti Tuhan yang personal, Tuhan Yang Maha Mengetahui, Tuhan Yang Maha Mendengar, dan sebagainya. Religiusitas berbeda dengan spiritualitas, dalam hal yang pertama Tuhan itu personal, sedangkan yang kedua “Tuhan” itu impersonal. Religiusitas dalam arti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itulah yang menjadi ciri Masyarakat Madani Indonesia; jadi bukan sekedar spiritualitas.

Berbudi luhur adalah padanan dari istilah *akhlaqul karimah* atau bermoral. Kalau religius berkaitan dengan hubungan vertikal, yaitu manusia dengan Tuhan, berbudi luhur itu berkaitan dengan hubungan horisontal, manusia dengan manusia. Jujur, sopan-santun, rukun, hormat, suka menolong, dan tenggang rasa adalah contoh dari budi luhur kepada sesama.

2. Adil dan Sejahtera

Masyarakat Madani Indonesia berlaku adil, sama kepada setiap orang. Secara positif, hak diberikan kepada siapa saja yang mempunyainya. Demikian juga secara negatif, hukuman diberikan kepada siapa saja yang bersalah. Keduanya diberlakukan tanpa menghitung-hitung untung dan ruginya, tanpa mempertimbangkan persamaan/perbedaan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), persaudaraan, hubungan kerabat, partai, kelas, dan sebagainya.

Sejahtera secara lahiriah adalah padanan kata dari makmur atau berkecukupan. Artinya, masyarakat bersama-sama berusaha mewujudkan terciptanya kemakmuran sehingga setiap orang memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Sejahtera secara batiniah adalah padanan kata dari puas atau bahagia. Setiap orang,

sesuai dengan kemampuan masing-masing, perlu mendapat kepuasan.

Adil dan sejahtera berarti adil dalam kemakmuran dan kepuasan, bukan adil, tetapi dalam kemiskinan dan kesengsaraan.

3. Demokratis dan Toleran

Arti pertama demokrasi ialah hubungan antara negara dan rakyat, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara yang serba-kuasa tidak lagi mempunyai tempat. Arti kedua ialah dibicarakan semua perbedaan kepentingan masyarakat untuk mencapai titik temu. Dalam hal ini tak bisa diingkari bahwa masyarakat Indonesia bersifat majemuk, terdiri dari banyak suku, agama, lapisan, dan jenis pekerjaan yang semuanya mempunyai kepentingan yang berbeda. Untuk menghindari benturan antarkepentingan itulah, sebuah lembaga untuk berunding bersama diperlukan.

Sebuah demokrasi, baik dalam arti pertama maupun dalam arti kedua, memerlukan sifat toleran walaupun tenggang rasa. Negara perlu memahami kepentingan rakyat, dan rakyat tidak boleh memaksakan kehendak kepada negara sebab negara itu milik orang banyak. Demikian juga, antargolongan di dalam masyarakat harus ada saling pengertian, tidak hanya mendahulukan kepentingan sendiri dengan menafikan kepentingan orang lain. Kuncinya terletak dalam toleransi, saling memahami kepentingan masing-masing.

4. Mandiri dan Bertanggung Jawab

Mandiri mengandung banyak arti (politis, ekonomis, sosial, psikologis). Intinya, mandiri berarti lepas dari kekuatan di luar diri. Mandiri secara politis, artinya, ialah masyarakat berdiri sendiri

tanpa campur tangan dari negara. Dalam kemandirian, negara membiarkan masyarakat berinisiatif sendiri. Berbeda dengan sejarah bangsa Indonesia masa lalu di zaman orde lama dan orde baru. Waktu itu negara begitu banyak melakukan rekayasa terhadap masyarakat melalui banyak cara, seperti indoktrinasi, penataran, partai pemerintah, monoloyalitas, dan tuduhan-tuduhan pembangkangan.

Bertanggung jawab artinya anggota masyarakat tidak akan merugikan sesamanya dan satuan yang lebih besar, masyarakat luas, atau negara. Termasuk dalam bertanggung jawab ini adalah hidup rukun, cita-cita demokrasi, dan masyarakat majemuk. Amuk massa, kekerasan, memaksakan kehendak, dan semua bentuk gangguan terhadap umum termasuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

5. Tertib dan Teratur

Tertib dan teratur adalah dua sisi dari keadaan yang sama. Seumpama sebuah bola, kita dapat melihatnya dari dalam bola, kita pun dapat melihatnya dari luar bola. Dari dalam bola itu tampak cekung, sedangkan dari luar bola itu tampak cembung. Demikianlah kalau kita melihat dari dalam masyarakat akan kita temukan ketertiban. Sementara itu, kalau kita melihat dari luar masyarakat akan kita temukan keteraturan.

Masyarakat disebut tertib apabila ada dorongan dari dalam, sebuah kondisi psikologis untuk patuh pada peraturan. Orang tertib berlalu lintas bila tidak ada tabrakan, sekalipun tanpa polisi dan tanpa rambu-rambu. Masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang dapat mengatur diri sendiri, masyarakat yang memang punya kemauan untuk tertib. “Pengawasan dari dalam” adalah kunci bagi ketertiban. Menang sendiri, aji mumpung, dan “budaya korupsi”

banyak disebabkan oleh tiadanya ketertiban.

Adapun masyarakat disebut teratur kalau ada kepatuhan pada peraturan-peraturan. Ibarat berlalu-lintas, orang hanya akan patuh apabila ada rambu-rambu atau polisi. Adanya perundangan, penegak hukum, dan kekuasaan sangat diperlukan dalam masyarakat yang teratur. Kata kunci dari masyarakat yang teratur adalah “supremasi hukum”. Pelanggaran hak asasi manusia adalah tanda tiadanya keteraturan dalam masyarakat.

Bisa juga terjadi kedua-duanya tidak ada. Amuk massa, tawur, pengadilan massa, macam-macam bentuk kekerasan, penyalahgunaan wewenang, upeti, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme timbul karena hilangnya sifat tertib dan teratur dari masyarakat.

6. Setara dan Berkebersamaan

Masyarakat Madani Indonesia memperlakukan kesetaraan kepada semua golongan di dalam masyarakat, tanpa memandang perbedaan SARA, jenis kelamin, pekerjaan, dan kedudukan seseorang. Begitu pula mereka mempunyai kesempatan yang sama di dalam pendidikan, pekerjaan, dan karir.

Bangsa Indonesia pernah punya pengalaman pahit masa lalu karena adanya perbedaan itu. Dalam masyarakat jajahan ada perbedaan antara orang Eropa dan orang pribumi. Dalam masyarakat feodal ada perbedaan antara bangsawan dan orang kebanyakan serta antara priyayi dan orang kecil. Bahkan, di masyarakat maju seperti Amerika ada perbedaan di antara orang kulit putih dan kulit hitam. Kecurigaan pada keturunan Afrika, Arab, dan Asia masih terdapat di negara Eropa. Di Australia ada perbedaan tajam antara penduduk aborigin dan orang kulit putih. Beruntunglah dalam masyarakat Indonesia sekarang sudah ada kesetaraan itu.

Di sisi lain kebersamaan belum terdapat di dalam masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai kesetaraan. Selama ini kita melihat kebersamaan hanya terbatas pada kelompok sendiri, semacam egosentrisme kelompok. Sebagai ideologi, kebersamaan yang selama ini dikembangkan juga terbatas pada politik menjadi nasionalisme politik. Kita lupa bahwa dalam lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya kita juga memerlukan kebersamaan. Dalam soal lingkungan, ada yang tak mau mengerti bahwa kita menghirup udara yang sama sehingga dengan sewenang-wenang mengotori udara bersama. Kebersamaan dalam lingkungan perlu dikembangkan menjadi “bersama anak cucu” sehingga lingkungan sebenarnya juga milik generasi yang akan datang. Kebersamaan dalam ekonomi mengandaikan bahwa bangsa Indonesia adalah satu keluarga yang tidak akan membiarkan satu anggota makmur sedangkan anggota lainnya sengsara.

7. Integritas dan Berketangguhan Budaya

Sudah disadari bahwa suku-suku bangsa di Indonesia masing-masing punya kebudayaan tinggi. Integritas budaya sudah dimiliki. Kreativitas yang dikembangkan mula-mula juga bersandar dalam integritas budaya itu. Simbol-simbol baru dalam seni, sastra, dan ilmu tidak pernah mengganggu integritas itu, bahkan menyuburkannya; tetapi integritas itu kini terganggu dengan adanya globalisasi, yang secara praktis berupa Westernisasi. Sekarang ini hanya budaya populer, seperti musik, nyanyi, fesyen, budaya dapur, arsitektur, pergaulan muda-mudi, dan barang-barang pakai yang terkena. Barangkali yang paling menakutkan dari serangan globalisasi ialah merebaknya minuman keras, narkoba, seks bebas, dan HIV.

Ketangguhan budaya diperlukan untuk mencegah agar globalisasi yang sudah menyangkut budaya populer tidak merembet pada budaya tinggi. Budaya tinggi mempunyai ketangguhan budaya, dan tidak akan terkena globalisasi. Dalam banyak hal budaya tinggi justru menunjukkan adanya penemuan kembali klasikisme. Di dalam sastra ada penemuan kembali mantra, di dalam musik ada penemuan kembali nyanyian keagamaan serta kombinasi musik modern dengan musik etnis, dalam sinetron cerita-cerita silat juga mulai digemari. Kreativitas diperlukan dalam penciptaan simbol sehingga selama bangsa Indonesia masih kreatif, simbol-simbol asing tidak akan bisa mendapat akar. Kita tidak akan menutup diri, malah harus terbuka terhadap kemungkinan perubahan budaya, terutama bagian tepi-tepi yang tidak penting. Kita tetap optimis bahwa nilai inti budaya Indonesia, yaitu keberagaman dan *rasa ke-Indonesiaan*, tidak akan berubah. Meski simbol budaya dan nilai tepi berubah, nilai inti jangan. Kebudayaan yang kehilangan nilai inti akan lenyap.

8. Dinamis dan Berorientasi ke Depan

Masyarakat disebut dinamis bila memiliki kemampuan berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat kita sudah berubah: masyarakat pemburu jadi masyarakat agraris, masyarakat agraris jadi masyarakat industrial, dan masyarakat desa jadi masyarakat kota. Jangan sampai kita mengalami ketertinggalan budaya (*cultural lag*), sudah tiba waktunya menjadi masyarakat industrial, tetapi lembaga-lembaga masyarakat kita masih agraris. Kita memerlukan dinamika.

Untuk dapat dinamis, masyarakat perlu berorientasi ke depan. Berorientasi ke depan itu suatu kewajiban saat ini. Akan tetapi, pandangan itu dalam sejarah kita ternyata memerlukan evolusi yang

panjang. Cita-cita kemajuan (*the idea of progress*) yang bagi orang Eropa sudah ada sejak Zaman Pencerahan abad ke-18, di Indonesia baru terjadi awal abad ke-20. Pada waktu itulah orang mengenal istilah kemajuan, *kamajengan* atau *hamajoan*. Sebelumnya orang berpikir bahwa sejarah itu mundur, zaman sekarang adalah zaman bencana (*kalabendu*). Atau, sejarah adalah siklus, roda yang berputar, sekali di atas sekali di bawah (*cakra-manggilingan*). Dalam keduanya, orientasi ke depan tidak ada. Kita harus mengarahkan pandangan ke depan, selalu siap dengan perubahan-perubahan.

Dengan perubahan-perubahan yang disebut sebagai loncatan kebudayaan pribadi dan masyarakat Indonesia bisa disiapkan untuk membangun sebuah masyarakat madani. Demikian juga, filsafat hidup bangsa, Pancasila, yang sesungguhnya sila-silanya sudah merujuk pada pembentukan masyarakat madani, tetapi yang selama ini tidak pernah dilaksanakan secara koheren dan konsekuen.

C. Perubahan Budaya

Mendefinisi kebudayaan sebagai simbol dan nilai yang dapat mempengaruhi perilaku akan ditemukan pentingnya perubahan kebudayaan itu sendiri dalam kaitannya dengan keinginan untuk bisa membentuk masyarakat madani. Dalam keadaan sekarang ini, kebudayaan Indonesia memang tidak kondusif. Perubahan kebudayaan diperlukan supaya pembentukan masyarakat madani berjalan dari bawah, dari masyarakat sendiri; tidak dipaksakan dari atas dan supaya sejarah tak meloncat tanpa terkendali. Perubahan itu akan meliputi perubahan sistem pengetahuan dan perubahan budaya politik.

Perubahan tersebut menyangkut pribadi, kelompok,

masyarakat, negara, dan ideologi nasional Pancasila. Perubahan ideologis itu hanya menyangkut interpretasi baru terhadap Pancasila. Jadi, suatu perubahan yang tidak jauh dari “pohon kebangsaan” Indonesia. Perlu ada pemahaman baru tentang Sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 Pancasila. Sila kemanusiaan misalnya, yang selama ini dipahami secara makro, yaitu hak merdeka untuk bangsa menjadi pemahaman secara mikro menyangkut pribadi, institusi, dan masyarakat yang manusiawi. Dengan kata lain, dari Pancasila yang abstrak menuju ke Pancasila yang konkret.

1. Perubahan Sistem Pengetahuan

Subjek perubahan sistem pengetahuan itu ialah pribadi, kelompok, dan masyarakat. Akan tetapi, pada hitungan terakhir, apapun juga sistem sosialnya, pribadilah yang akan merasakan manis-pahitnya, senang-susahannya, dan menanggung semua akibatnya. Oleh karena itu, apapun juga sistem sosial politiknya, kebahagiaan pribadi itulah yang harus diutamakan.

Bangsa Indonesia jangan mengulang kesalahan totaliterisme yang lebih mementingkan unit sosial daripada unit pribadi. Perubahan yang diperlukan untuk pribadi, kelompok, dan masyarakat adalah (a) egosentrisme ke sivilitas (*civility*), (b) pengabaian hukum ke kesadaran hukum, (c) fanatisme ke toleransi, (d) cukup-diri (*self-sufficiency*) ke saling-bergantung (*interdependence*), dan (e) sejarah yang alamiah ke sejarah yang manusiawi.

a. Egosentrisme ke Sivilitas

Pengaruh egosentrisme dalam perilaku sehari-hari tampak dalam banyak hal. Keengganan orang untuk antri di depan loket-loket pertunjukan, perjalanan, dan urusan bisnis di kantor-kantor (kantor

pos, kantor pajak, kantor polisi, kantor agraria, dan sebagainya) merupakan gejala egosentrisme. Demikian pula perilaku berkendara di jalan raya, “jalan pintas” ke arah sukses di sekolah, birokrasi, dan bisnis, serta upeti-upeti untuk melancarkan urusan.

Persaingan dalam hukum juga sangat rawan dengan egosentrisme, di mana pengakuan palsu, pemalsuan dokumen, dan saling tuduh antarterdakwa menjadi gejala umum. Belum lagi kasus-kasus suap kepada pengacara, jaksa, dan hakim. Kasus-kasus perkosaan dan ringannya hukuman bagi pemerkosa di Indonesia pasti bermula dari egosentrisme laki-laki. Egosentrisme menjadi masalah sosial bila sudah meningkat menjadi egosentris kelompok. Perlakuan tidak berperikemanusiaan penduduk terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun santet bermula dari egosentrisme pribadi yang berakumulasi menjadi egosentrisme kelompok. Pedagang asongan yang mengamuk di terminal, petambak yang merusak tambak gara-gara berselisih dengan pemilik, pekebun plasma yang merusak kebun coklat adalah contoh yang lain. Tawuran antarpelajar, tawuran antarsuporter, holiganisme suporter sepak bola, dan perang antargeng. Pengadilan massa atas pelanggaran, kriminalitas, dan perilaku tak menyenangkan lainnya. Demo-demo juga banyak yang disebabkan oleh egosentrisme kelompok.

Pada umumnya egosentrisme dapat hilang oleh sivilitas, yang artinya adalah perilaku berbudaya (*the state of being civilized*). Pembudayaan itu adalah proses yang kompleks dan perlu waktu. Akan tetapi, tidak semua gejala egosentrisme dapat hilang dengan datangnya sivilitas, terutama yang menyangkut kriminalitas.

b. Pengabaian Hukum ke Kesadaran Hukum

Berbagai kasus menjelang berakhirnya Orde Baru pada Mei 1998 pada banyak kota seperti Jakarta dan Solo, “kekuasaan” rakyat

setelah jatuhnya Orde Baru, dan SI MPR 1998 adalah mimpi buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Selain kerugian fisik, kota seperti Solo yang terkenal dengan budaya *adiluhung*, ternyata dalam peristiwa itu menunjukkan bahwa budaya *adiluhung* bukan jaminan untuk tidak mengenal kekerasan. Mungkin penyebabnya banyak, seperti tiadanya lagi otoritas yang disegani, tersedianya lapisan “proletariat” kota yang merasa “tidak akan kehilangan apa-apa” dalam kerusuhan, serta adanya tradisi radikalisme. Apapun penyebabnya, yang jelas adalah hukum diabaikan. Di beberapa tempat lain, kasus-kasus seperti pencurian kayu, penyerobotan tanah, dan pendaulation para pejabat oleh warga juga menunjukkan betapa rapuh sesungguhnya kesadaran hukum oleh pribadi dan kelompok.

Pengabaian hukum itu masih terasa sampai sekarang. Sudah barang tentu dalam keadaan seperti itu tidak mungkin suatu masyarakat madani dapat tegak kokoh. Masyarakat madani hanya dapat ditegakkan dengan kesadaran penuh akan hukum. Sebaliknya, para penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara) tidak boleh berbuat tercela sedikit pun, seperti melakukan KKN dan salah urus, supaya proses ke arah kesadaran hukum terjadi. Tanpa hukum, model masyarakat apapun tidak akan jalan.

c. Fanatisme ke Toleransi

Penyakit fanatisme biasanya disandang oleh mereka yang merasa mempunyai semacam ideologi. Kasus-kasus yang terjadi pada setiap kampanye Pemilu di Indonesia dan menjelang Pemilu 1999 antara pendukung PDIP dan Golkar di banyak tempat serta antara pendukung PKB dan PPP di Jepara menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia belum dewasa. Barangkali kasus terparah dari

fanatisme kelompok adalah peristiwa di Solo dan Bali yang terjadi pada akhir SU MPR 1999 sewaktu Megawati tidak terpilih sebagai presiden. Di kedua tempat tersebut telah terjadi perusakan massal dan pembakaran baik terhadap kantor-kantor pemerintah seperti di Solo atau kediaman pribadi seperti di Bali.

d. Cukup Diri ke Saling Bergantung

Menyaksikan kampanye partai-partai pada beberapa pemilu lalu, seolah-olah setiap partai bisa hidup sendiri memerintah negara tanpa memerlukan yang lain. Bila betul ada satu partai saja yang dominan, pastilah negara akan penuh kediktatoran, dan sejarah Orde Baru terulang. Merasa paling benar juga ditemukan pada buruh; seolah-olah buruh dapat hidup sendiri tanpa pengusaha. Pedagang hidup sendiri tanpa pelanggan, pemilik tanah tanpa buruh tani, petambak tanpa tambak dan pengusaha tambak, dan seterusnya. Sebaliknya, juga bisa terjadi: pengusaha dapat hidup tanpa buruh, perusahaan agroindustri tanpa petani, pemilik tambak tanpa petambak, dan sebagainya. Gejala itu juga tampak pada kelompok-kelompok etnis tanpa melihat realitas bahwa bangsa ini sudah disatukan oleh sejarah. Separatisme di daerah yang alasan pemisahan diri tidak pas, seperti Makassar, sebagian pasti disebabkan oleh arogansi cukup diri itu.

Indonesia beruntung karena kelas sosial tidak dipermasalahkan. Apabila PKI bangkit lagi, kalau masih ortodoks, pertentangan kelas pasti akan digalakkan kembali: proletariat dengan borjuasi, tuan tanah dengan buruh tani, dan buruh dengan majikan. Di masa depan, arogansi cukup-diri itu harus ditinggalkan, digantikan oleh kenyataan bahwa ada saling ketergantungan satu sama lain.

e. Sejarah yang Alamiah ke Sejarah yang Manusiawi

Di dalam sejarah yang alamiah pasti berlaku hukum rimba: *asu gedhe menang kerahe, dog eats dog, survival of the fittest*, yang besar menang atas yang kecil, dan yang kuat atas yang lemah. Sejarah semacam itu telah meracuni benak manusia, seolah-olah tidak ada institusi yang manusiawi. Sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta UUD 1945 seperti ketentuan bahwa fakir-miskin dipelihara oleh negara serta ekonomi kekeluargaan, jelas-jelas menolak sejarah yang alamiah. Praktik kenegaraan selama ini dengan puskesmas, posyandu, Bulog-Dolog, Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Presiden (Banpres), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dan berbagai skema kredit sudah mengarah ke sejarah yang manusiawi. Entah institusi mana yang akan digugurkan sehubungan dengan makin menciutnya peran negara, swastanisasi, dan otonomi daerah. Kalau nanti masyarakat madani terbentuk berarti kapitalisme trans-nasional, ekonomi terbuka, dan pasar bebas masih harus ada pemikiran ke arah sejarah yang manusiawi, jangan lagi kembali ke sejarah yang semata-mata alamiah.

Di dalam perwujudan masyarakat madani harus dipikirkan benar keadilan untuk semua pihak, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan produktif (*productive justice*), dan keadilan komutatif (*commutative justice*). Keadilan distributif menyangkut seluruh warga termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan jompo untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Keadilan produktif menyangkut pemilik modal, pemilik tanah, dan pemilik tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Keadilan komulatif menyangkut mereka yang terlibat dalam pertukaran barang dan jasa. Mengenai keadilan komutatif itu, dalam

praktik selalu ada kesenjangan antara produk pertanian dengan produk manufaktur, produk barang dengan produk jasa, dan produk impor dengan produk dalam negeri.

2. Perubahan Budaya Politik

Perilaku politik manusia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, dalam arti tidak hanya rasional, ekonomis, dan pragmatis. Nilai-nilai budaya itu pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh sejarah, adat, lingkungan, dan kekuasaan yang ada atau pernah ada. Tanpa terlibat dalam analisis akademis, misalnya dengan merujuk pada klasifikasi Gabriel A. Almond, perubahan budaya politik itu terjadi dari (a) kawula ke warga negara, (b) parokial ke kenegaraan, (c) negara serba kuasa ke negara serba sederhana, (d) Pancasila sebagai ideologi ke Pancasila sebagai ilmu, dan (e) ideologi Pancasila yang inkoheren ke “ideologi” Pancasila yang koheren. Hanya (a) dan (b) yang merujuk pada konsep budaya politik yang ada dalam teks buku-buku ilmu politik.

a. Kawula ke Warga Negara

Kecuali untuk beberapa tahun pada masa “demokrasi liberal”, bangsa Indonesia terbiasa dengan budaya politik kawula (*subject political culture*). Fenomena ini membudaya dan memiliki latar belakang sejarah yang jauh ke masa lampau, yaitu pada kerajaan-kerajaan tradisional, pada terlalu lamanya menjadi *in-lander* di bawah Hindia Belanda, dan sebagai kawula bagi mereka yang berada di daerah Kejawaen. Kedudukan negara dan presiden dianggap sama dengan kedudukan kerajaan dan raja. Raja dianggap memiliki wahyu (hak memerintah) dan pulung (legitimasi). Kata-kata raja merupakan “*sabdha pandhita ratu*” yang tidak terbantah karena raja adalah wakil Tuhan (*khalifatullah*).

Masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia bagaimana Manifesto Politik dari Soekarno diperlakukan seperti kitab suci di dalam indoktrinasi oleh warga negara yang jatuh jadi semata-mata kawula. Di zaman Orde Baru ada Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P-4), sama seperti indoktrinasi model “latihan-latihan” di Zaman Jepang. *Kontra-Revolusi* Orde Lama sama haramnya dengan *anti-Pancasila* Orde Baru. Latihan, indoktrinasi, dan penataran (P4) menjadi tolok ukur apakah seseorang sudah menjadi yang dikehendaki negara, yaitu menjadi kawula. Budaya politik kawula ini harus digantikan dengan budaya politik warga negara (*participant political culture*), warga negara yang sadar akan hak-haknya, bukan saja sadar akan kewajiban-kewajibannya, dan aktif berpartisipasi dalam politik.

b. Parokial ke Kenegaraan

Parokialisme disebabkan oleh pandangan sempit kedaerahan. Parokialisme adalah akibat dari banyak hal: kesamaan ras, etnis, agama, dan bahasa. Kecenderungan ke arah disintegrasi nasional akhir-akhir ini banyak disebabkan oleh parokialisme itu.

Dengan mengabaikan faktor ekonomi dan politis, daerah-daerah bergolak, seperti Sambas, Aceh, Maluku, dan Papua, disebabkan oleh salah satu kesamaan ciri dalam budaya politik parokial. Orang Papua, misalnya, dapat mengklaim diri sebagai ras Melanesia dan bukan ras Austronesia atau Melayu seperti umumnya bangsa Indonesia. Dekat dengan parokialisme ialah sektarianisme, primordialisme, komunalisme, dan rasialisme. Sektarianisme adalah pertentangan sekte keagamaan seperti antara orang Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Primordialisme adalah gejala pertentangan karena perbedaan yang dibawa sejak lahir seperti antara orang Jawa dan Sumatera masa lalu. Kerusuhan di

Kupang disebabkan oleh komunalisme atau perbedaan ras. Peristiwa Ambon adalah parokialisme yang berkembang jadi komunalisme di Maluku Utara dan Halmahera.

Sebab-musabab kelimanya terletak dalam kurangnya apresiasi pada sejarah kebangsaan. Bahwa orang Melayu dan Cina sama-sama pendatang, hanya waktunya yang berbeda, tidak banyak disadari. Demikian juga masalah agama: Hindu, Budha, Islam, Katolik, dan Protestan mempunyai waktu, sebab, dan penyebaran berbeda-beda. Semuanya itu termasuk dalam satuan besar sebagai bangsa dan negara Indonesia.

c. Negara Serba Kuasa ke Negara Serba Sederhana

Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan negara serbakuasa (*ambaudhendha*) model Orde Baru yang ditiru dari kerajaan-kerajaan patrimonial di Jawa, seperti Mataram. Di masa lalu negara dapat membagi kemakmuran (lisensi, monopoli, HPH, kontrak karya), membagi-bagi kekuasaan (gubernur sampai camat), dan membagi-bagi kehormatan (bintang, anugerah, tanda jasa). Dari ketiganya itu, yang mempunyai implikasi ekonomis, sosial, dan politik ialah pembagian kemakmuran. Pada masa Orde Baru ada *big government*, *big business*, dan *big military* yang saling bekerja sama. Negara serba kuasa itu menguasai buruh, tani, bahkan olah raga. Masalah-masalah yang dihadapi Kabinet Persatuan Nasional sekarang (KKN, konglomerasi, pelanggaran HAM) tidak lain karena konsep negara serba kuasa itu. Lebih disederhanakan lagi negara serba kuasa itu dipersonifikasikan pada satu orang, yaitu presiden.

Konsep negara serba kuasa itu dalam masyarakat madani yang akan datang harus diganti dengan negara serba sederhana. Negara

hanya bertindak sebagai penjaga (*ambaureksa*). Lembaga-lembaga swasta diharapkan menggantikan peran yang pada masa Orde Baru dikerjakan oleh negara. Akan tetapi, yang perlu diingat ialah bahwa Sila ke-2 dari Pancasila sudah menetapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang manusiawi.

d. Pancasila sebagai Ideologi ke Pancasila sebagai Ilmu

Perdebatan teoritis mengenai hubungan ideologi dan ilmu sudah sangat sering terjadi, khususnya mengenai epistemologinya. Dalam hal ini sudah banyak sarjana, seperti Daniel Bell dari Amerika dan Raymond Aron dari Prancis, yang pada akhir 1960-an menyatakan bahwa ideologi tidak lagi relevan untuk masyarakat industrial.

Seorang aktivis dan redaktur majalah ilmiah Jerman Timur, Rudolf Bahro, pada tahun 1977 melancarkan kritik pada ideologi sosialisme dalam praktik, harus dijebloskan ke penjara selama delapan tahun. Akhirnya, berkat protes internasional pada tahun 1979 ia dibebaskan dan segera pindah ke Jerman Barat untuk ikut membidani berdirinya Partai Hijau. Baru pada 1989 ideologi benar-benar berakhir, ideologi tidak lagi sesuai dengan masyarakat Barat. Bagaimana dengan Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat bagaimana ideologi dan ilmu dalam praktik kenegaraan Indonesia. Seperti diketahui, Orde Baru banyak merekrut para ilmuwan (teknokrat) untuk masuk dalam politik melalui Golkar, terutama ilmuwan ekonomi. Malahan rezim ini terkenal dengan program de-ideologisasinya dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Transisi keilmuan tersebut berkelanjutan pada masa Presiden B.J. Habibie, di antaranya dengan mengangkat tim kepresidenan

yang terdiri dari para ilmuwan untuk merumuskan masyarakat madani. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid lebih cenderung mengangkat orang partai sebagai pembantunya, sekalipun demikian orang partai itu dipilih sesuai dengan bidang keilmuannya. Dengan kata lain, tradisi penempatan ilmu di atas ideologi sudah membudaya di Indonesia, sejak ideologi komunisme melahirkan G-30-S pada tahun 1965. Rupanya orang Indonesia sudah jera dengan ideologi dan berpaling pada ilmu. Ilmu itu objektif, toleran, dan terbuka.

Pada Orde Baru ada inkonsistensi dalam pelaksanaannya yang ternyata fatal bagi sejarahnya sendiri. Deideologisasi bukannya lalu berarti menjadikan Pancasila sebagai ilmu yang nonideologis, melainkan sebaliknya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang reaktif. Pancasila dipakai untuk stigmatisasi: ada golongan anti-Pancasila, ekstrim kanan (Islam), ekstrim kiri (Komunis), dan mau mengganti Pancasila dengan ideologi lain (biasanya juga berarti Islam). Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, ideologi Pancasila menjadi subjektif, fanatis, dan tertutup, sekalipun pada masa akhir Orde Baru sebagai basa-basi politik dinyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka.

e. Ideologi Pancasila yang Inkoheren ke “Ideologi” Pancasila yang Koheren

Bahwa pada masa lalu tidak ada koherensi dalam Pancasila kiranya cukup jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Bagaimana membuat Pancasila koheren? Ada dua transformasi kultural untuk mencapai kekohesifan (*cohesibility*), yaitu menjadikan sila-sila Pancasila dari hanya mengurus persoalan personal menjadi Pancasila yang juga mengurus masalah publik (*publicness*) dan menyatukan Pancasila sebagai ‘sebuah’ gagasan yang utuh. Adapun

makna ‘sebuah’ dalam kalimat ini menegaskan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan (*unity*).

f. Pancasila yang hanya Mempersoalkan Urusan Personal ke Pancasila yang juga Mempersoalkan Urusan Publik

Mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, sekalipun harus disadari bahwa Sila pertama itu tidak selalu berarti agama, tetapi di sini hanya akan dibicarakan masalah agama terdapat gejala ke arah privatisasi agama dalam masyarakat modern, terutama di kota-kota besar, di mana agama masih diperlukan tetapi untuk keperluan personal, seperti membuat tenang diri, berdisiplin, dan tidak “macam-macam”. Populernya sufisme merupakan salah satu gejalanya.

Kesalehan personal memang perlu, tetapi tidak cukup. Harus ditambah dengan kesalehan publik, artinya kesalehan yang memiliki akibat publik. Demikian juga Sila kedua (misalnya, perlakuan yang manusiawi terhadap pembantu rumah tangga), ketiga (misalnya, hidup berdampingan dengan damai dengan tetangga berlainan etnis dan ras), dan Sila ketiga (misalnya, membayar tukang yang bekerja di rumah dengan baik). Satu-satunya sila yang sudah menjadi urusan publik adalah Sila keempat (musyawarah), ada pemilu ada DPR ada MPR. Orang mengira bahwa dengan *publicness* Sila keempat itu sudah selesai, padahal seluruh sila harus mengurus publik.

g. Pancasila yang Terpisah Manjadi Pancasila yang Satu

Pada masa Orde Baru ada inkoherensi (ketakterpaduan) masing-masing peserta pemilu dapat jatah satu Sila. Bintang untuk PPP, Banteng untuk PDI dan Beringin untuk Golkar. Lambang-lambang yang sebenarnya hanya bendera, tetapi kemudian timbul stigmatisasi oleh masyarakat. Bintang hanya berpikir tentang agama tidak memikirkan manusia, Banteng merupakan

partai sekuler yang hanya berpikir semata-mata dari sudut kemanusiaan, dan Beringin memayungi semua golongan. Stigma itu sebagian benar, sebagian salah. Untuk menghindari stigmatisasi semacam itu, semua sila harus dipadukan, yang satu tak terpisahkan dengan yang lainnya, misalnya kesejahteraan sosial yang menusiawi. Keterpaduan Sila kelima dan Sila kedua itu menutup kemungkinan untuk ajaran Marxisme-Leninisme yang mengagungkan kontradiksi kelas.

BAB VI

STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

A. Pandangan Dasar

Strategi pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional bertumpu pada asumsi bahwa kehidupan kebudayaan suatu bangsa dapat ditangani dengan manajemen, dan bahwa kegiatan-kegiatan manajemen kebudayaan adalah sah (*legitimate*). Sejalan dengan itu, kehidupan kebudayaan yang dinamis tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial alamiah dari masyarakat bangsa yang mendukungnya, tetapi juga terkait kepada jenis *kebijakan dan usaha-usaha khusus* dari pemerintah yang diberi kuasa oleh masyarakat bangsa tersebut, terutama dalam kemajuan dan percepatan pengembangan kebudayaan secara sistematis dan terencana sesuai dengan cita-cita bangsanya.

Dinamika kebudayaan tidak hanya dibiarkan hidup secara alamiah, yaitu tergantung pada kondisi alami dan iklim sosial yang tumbuh dan berubah, tetapi tergantung pada karsa, daya, karya, dan harapan tentang masa depan bangsa dalam memacu dan meng-gairahkan kehidupan budayanya. Akhirnya, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dinamis sebagai hasil dari proses belajar dan sosialisasi masyarakat dalam berbangsa, tak hanya mengenal bentuk fisik sebagai karya manusia yang berbentuk tetap dan pasti, tetapi juga memiliki jiwa yang mengandung nilai rohani atau spiritualitas yang terus berkembang dan tidak dapat dibendakan dengan bentuk tetap dan menjadi kepastian yang pantang diubah.

B. Dinamika dan Tataran Kebudayaan

Sebagai perwujudan dari perkembangan pengalaman rohani, karsa, daya, dan cipta melalui proses belajar dan sosialisasi masyarakat yang menjadi pendukungnya, kebudayaan bersifat dinamis. Dinamika kebudayaan tidak hanya pada perubahan karya budaya yang tertangkap oleh pancaindera manusia, melainkan juga dalam penghayatan dan pemaknaan proses budaya.

Karya-karya budaya yang mempunyai kepastian bentuk fisik ataupun pola dapat berubah maknanya, bahkan tidak jarang menemukan makna baru, yang jauh berbeda dengan arti penciptaan awal mulanya. Konsep kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern pada dasarnya menunjukkan dinamika perkembangan budaya masyarakat yang sama di dalam menempuh perubahan zaman. Oleh karena itu, kebudayaan dapat disebut sebagai perwujudan dari kemampuan keseluruhan hidup masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan spasial dan temporal dalam upaya mewujudkan pengalaman rohani kehidupannya.

Dalam dinamika perkembangannya, tidak seluruh kebudayaan bangsa sebagai suatu kebulatan akan berubah karena kebudayaan terdiri dari tiga unsur yang membentuk suatu bangunan tersusun dengan tiga tataran, yakni (1) karya-karya budaya yang berbentuk benda-benda fisik yang tertangkap pancaindera, khususnya penglihatan dan pendengaran, (2) nilai rohani yang mendasari karya-karya budaya dan pola-pola perilaku yang dikenal dengan sebutan seperangkat nilai personal dan sosial, dan (3) sejumlah asumsi dasar tentang filosofi atau nilai dasar di dalam kehidupan manusia pada zamannya yang mengandung keyakinan mengenai hakikat manusia, keyakinan manusia tentang ruang dan

waktu, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hakikat kegiatan manusia dan hubungan antarmanusia.

Sejumlah asumsi dasar yang lebih terkenal dengan sebutan seperangkat nilai-nilai dasar (*core values*) terdapat di lubuk bawah sadar sehingga tidak tertangkap oleh pancaindera dan dihayati manusia dalam kehidupan bersamanya tanpa dipertanyakan (*taken for granted*) ataupun menimbulkan banyak persoalan. Dengan demikian, di tataran paling bawah dari bangunan kebudayaan tersebut terdapat unsur universal, sedangkan pada tataran atasnya terdapat unsur-unsur materi fisik dan perilaku sosial ataupun personal yang mengandung nilai-nilai simbolik. Pengembangan perubahan dan pembaharuan makna dapat dilaksanakan pada kedua tataran ini, tetapi yang paling mudah adalah pada tataran pertama. Dengan demikian, kebudayaan yang merupakan hasil karya, karsa, rasa, dan cipta manusia selain merupakan pengejawantahan manusia merdeka di tengah alam semesta sekaligus juga menunjukkan tingkat keberhasilan perjuangannya sebagai manusia dalam kehidupan bersama menanggapi tantangan ataupun perubahan zaman.

Perubahan-perubahan itu terjadi silih berganti dalam pemunculan dalam bentuk-bentuk baru atau pemberian makna-makna baru yang oleh sejarah dicatat sebagai perkembangan kebudayaan.

Benda-benda budaya yang tertangkap pancaindera dari masa silam dikenal sebagai benda-benda warisan budaya atau peninggalan purbakala, seperti alat-alat batu, besi, tembaga dan emas, bangunan-bangunan candi, tugu, rumah, patung dan monumen, yang terbukti dapat mengatasi kikisan alam dan waktu. Dokumen-dokumen lontar, kulit, prasasti, gambar-lukisan, dan lain-lainnya

dapat pula dimasukkan dalam kategori benda-benda warisan budaya. Nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat ditemukan dalam benda- benda budaya tersebut.

Pengungkapan nilai-nilai keagungan tersebut juga tertuang dalam berbagai bentuk “kagunan” atau karya keindahan dari olah irama dan warna, seperti gerak tarian, lagu suara musik, nyanyian, dan paduan warna dalam lukisan, rias, ataupun hiasan. Karya- karya keindahan itu selain mengandung nilai-nilai simbolik, juga mencerminkan cita rasa kesenian tinggi yang erat berkaitan dengan siklus kehidupan masyarakat, baik yang bersifat keagamaan, sosial, maupun keluarga. Warisan kesenian menunjukkan adanya berbagai jenis musik, nyanyian dan tarian khusus yang dikembangkan untuk upacara-upacara keagamaan, peristiwa-peristiwa sosial dan fase-fase kehidupan dalam keluarga, khususnya kelahiran, perkawinan, dan kematian.

Lebih nyata lagi, dalam nilai-nilai budaya tersebut ditemukan realita sosial yang tercipta melalui serangkaian tradisi, norma-norma kehidupan, ketentuan-ketentuan termasuk larangan-larangan mengenai hal-hal tabu dan tata cara dalam adat-istiadat, khususnya ritus dan ritual upacara serta parayaan sosial keagamaan lengkap dengan acara-acaranya yang rinci lagi rumit.

Sebagai realita sosial, tradisi memetakan interaksi di antara anggota masyarakat menurut nilai-nilai tatanan ideal. Selain memetakan perilaku sosial, tradisi juga merupakan perekayasaan nilai (*design of values*) yang tertuang di dalam tradisi wacana kearifan (*wisdom*) berupa mitos, legenda, dan fabel, yang melengkapi ritual dan ritual dalam siklus kehidupan.

Pandangan dasar sebagai keyakinan yang terpendam di lubuk

bawah sadar, meski tidak pernah dipertanyakan, memainkan peran sentral sebagai pedoman, sumber kekuatan dan penggerak kehidupan manusia yang sesuai dengan kodratnya, di tengah alam semesta, dan lingkungan sosialnya. Khususnya, bagaimana menjalani nasib guna memperjuangkan harkat dan martabatnya; menjalani hidup dan menghadapi masa depan; memberikan makna atas kerja dan interaksi sosial; menempatkan diri di dalam hubungan dengan Sang Pencipta; dan mengejar cita-cita sebagai panggilan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sesuai dengan keabadian kodratnya. Begitulah manusia bekerja dan beribadah, membangun dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan sesamanya, belajar dari sejarah masa lalunya untuk menghadapi masa depannya, memberdayakan sumber-sumber alam dan memelihara lingkungan hidupnya, serta mengembangkan nilai-nilai rohaninya melalui berbagai penciptaan seni sesuai dengan panggilan hidup ke arah kesempurnaan. Singkatnya, berkat pandangan dasar yang dihayati bersama manusia membangun peradaban yang sesuai dengan perkembangan harkat dan martabatnya di mana pun tempatnya dan kapan pun masa hidupnya.

Pandangan dasar tersebut merupakan seperangkat nilai pokok yang tahan uji terhadap segala perubahan zaman. Dengan dijiwai oleh nilai-nilai pokok itu, masyarakat dengan segenap perangkat sosialnya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi peningkatan intensitas penghayatan dan pengembangan konfigurasi nilai-nilai tersebut di kalangan segenap warganya. Keadaan ini dengan sangat jelas telah ditunjukkan oleh sejarah keruntuhan komunis yang menindas dan menolak menganulir pandangan dasar yang mengakar dalam lubuk bawah manusia tersebut.

C. Konsistensi Antartataran Kebudayaan

Hubungan di antara ketiga tataran budaya, benda, nilai, dan *pandangan dasar*, ialah harmonis sehingga dari benda-benda budaya dapat digali makna dan nilai-nilai, dan dalam tradisi budaya dapat ditemukan landasan *pandangan dasar*. Keserasian hubungan antara ketiga tataran kebudayaan inilah yang melahirkan konsep budaya sebagai wujud kebulatan hidup sosial manusia secara menyeluruh.

Dalam benda-benda budaya ditemukan keindahan dan keserasian karena keduanya sangat penting dan dijunjung tinggi dalam tradisi budaya yang selanjutnya di dalam tradisi budaya ditemukan nilai-nilai dasar yang menjadi asumsi dasar seperti religiusitas, kemanusiaan dan keyakinan tentang alam semesta. Singkatnya, asumsi dasar yang terdiri dari nilai-nilai paling tinggi, terpancar melalui nilai-nilai sosial dan personal yang membentuk jalinan tradisi dan adat-istiadat, serta melalui tradisi tersebut benda-benda budaya dapat dihasilkan oleh lingkungan masyarakat tertentu pada zaman tertentu. Sebagai wujud dari kebulatan kehidupan sosial manusia, kebudayaan menunjukkan konsistensi hubungan yang harmonis dan kuat di antara ketiga tatarannya.

Dalam sejarah budaya, karya-karya budaya umumnya bukanlah manifestasi dari penyimpangan-penyimpangan nilai dasar dan nilai sosial ataupun personal, melainkan pengembangan dan penegasan dari padanya. Namun, dalam hal ini perlu dicatat bahwasanya kesamaan pandangan dasar dan nilai-nilai tradisi tidak berarti harus terwujud di dalam benda-benda budaya yang sama bentuk dan gayanya karena bentuk dan gaya benda budaya dapat bervariasi sesuai dengan perkembangan lingkungan masyarakat dan zaman. Catatan ini penting karena warga masyarakat pendukung budaya

sering menyebar ke berbagai wilayah yang kondisi lingkungannya berbeda-beda sehingga dengan kesamaan nilai dasar toh terlahir benda budaya yang berbeda-beda juga dalam hal bentuk dan gaya. Dalam konteks inilah konsep *bhineka tunggal ika* (*unity in diversity*) yang menjadi filosofi kebudayaan bangsa Indonesia dapat dipahami dan dijelaskan secara lebih mudah. Apa lagi, kebhinekaan ini sekaligus juga menunjukkan adanya kesamaan, kesetaraan, dan martabat antarpada pendukung kesatuan budaya bangsa sehingga demokratisasi kehidupan berbangsa dapat lebih mudah dibangun.

D. Kebudayaan Bangsa: Ciri dan Fungsi

Kebudayaan kebangsaan (*national culture*) yang sering disingkat menjadi kebudayaan bangsa merupakan konsep baru karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang bertekad menjadi satu bangsa yang utuh dengan integritas dan identitas tertentu.

Kebudayaan bangsa menjadi dasar perwujudan karya dan perilaku manusia dalam kehidupan personal dan sosialnya. Landasan untuk memaknakan berbagai perwujudan karya dan perilaku manusia tersebut berupa sejumlah asumsi dasar yang sudah tidak pernah dinyatakan lagi dan dihayatinya di alam bawah sadar serta dianut sebagai filosofi bangsa (*social philosophy of the nation*).

Pandangan dasar yang dianut sebagai filosofi tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai posisi manusia di tengah-tengah alam semesta, termasuk keyakinan tentang hakikat manusia, moralitas kehidupan dan penghayatan tentang Ketuhanan, hakikat akan ruang dan waktu terutama tentang kekinian, masa lalu, dan masa depan, kemanusiaan atau kesamaan mengenai harkat dan martabat manusia, hakikat kegiatan manusia khususnya kerja,

hubungan antarmanusia, kebersamaan atau sosialitas, dan keadaban. Singkatnya, pemahaman filosofi kebudayaan bangsa dapat membantu proses pembentukan masyarakat madani yang mampu berbangsa dan bernegara secara demokratis dan beradab.

Berdasarkan asumsi tersebut kebudayaan bangsa membangun filosofi kebudayaan yang memancarkan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakatnya, yakni nilai religius dan berbudi pekerti luhur, adil dan sejahtera, demokratis dan toleran, mandiri dan bertanggung jawab, tertib dan teratur, kesetaraan dan kebersamaan, integritas dan berketahanan budaya, serta berorientasi ke depan.

Filosofi kebudayaan itu perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan membentuk bingkai bagi pemahaman dan penghayatan nilai budaya segenap warga bangsa. Sebagai bingkai pemahaman dan penghayatan nilai budaya, misalnya, menunjukkan bagaimana warga masyarakat secara individual ataupun sosial mewujudkan pola perilaku religius yang tak terlepas dari keadaban dan kemanusiaan dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks budaya ada seperangkat nilai perantara (*instrumental values*) yang berupa sifat-sifat luhur dikembangkan sebagian masyarakat bangsa demi terwujudnya nilai-nilai dasar kebudayaan bangsa. Nilai-nilai dasar kemandirian misalnya, bisa terwujud karena adanya dorongan untuk mengejar kemajuan, rasionalitas dan keilmuan terutama efisiensi kerja; nilai dasar kebersamaan bisa terwujud berkat semangat bekerja sama, kehidupan bersama dan kerukunan, saling menghargai, dan sebagainya.

Filosofi, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai sosial-instrumental memainkan peran vital dan dinamis karena sebagai landasan moral kehidupan masyarakat nilai-nilai tersebut menjadi sumber kekuatan, daya, pedoman, yang memungkinkan terjadinya

pertumbuhan dan perkembangan. Filosofi, nilai dasar, dan nilai instrumental dihayati dan dimanifestasikan sesuai dengan napas kehidupan modern yang penuh jebakan dari kondisi-kondisi objektif dan lingkungan strategis yang galau (*turbulent*). Dengan demikian, berbagai kepercayaan (*beliefs*) dan sikap-sikap (*attitudes*) yang berkembang dalam interaksi sosial dari kehidupan masyarakat yang beradab merupakan manifestasi dari dinamisme filosofi, nilai-nilai dasar, ataupun nilai instrumental yang menjadi pegangan hidup masyarakat tersebut. Dengan kata lain, filosofi, nilai-nilai dasar, dan sosial instrumental itu bukan--dan tidak dapat diperlakukan sebagai--jimat sakti, yang gaib lagi mujarab untuk menyembuhkan segala macam penyakit masyarakat. Seluruh filosofi dan nilai-nilai tersebut adalah sumber roh kekuatan bagi mereka yang berpribadi dan mandiri, sadar akan sejarah masa lalunya, sadar akan panggilan hidupnya kini, dan sadar akan arah dan harapan hidupnya pada masa depan.

Filosofi, nilai dasar, dan nilai sosial instrumental itu memberi inspirasi, terang, dan pengharapan bagi masyarakat yang bertekad memperjuangkan harkat dan martabat warganya dalam peradaban modern. Oleh karena itu, konsep budaya bangsa sebagai konsep modern pada dasarnya lebih merupakan proses pembentukan, dan bukan hasil pembentukan, kehidupan bangsa yang beradab yang bersumber pada segala nilai yang dihayati dalam kehidupan budaya tradisi yang tersebar di seluruh Nusantara.

Wujud kebudayaan bangsa adalah sebuah peradaban modern, yang muncul sebagai cerminan kehidupan bangsa yang satu, dinamis, dan peka terhadap perkembangan kebangsaan dan perubahan zaman. Maka, pada kebudayaan bangsa itu terpancar watak kebulatan yang utuh sebagai kesatuan dan kemajemukan yang

dilandasi oleh kesamaan perangkat filosofi, nilai dasar, dan nilai-nilai sosial yang bersumber pada moral tradisi sepanjang sejarah. Kehidupan kebudayaan bangsa menunjukkan peningkatan intensitas proses pencerdasan kehidupan bangsa secara terencana dan menyeluruh di dalam sebuah sistem pendinamisan persatuan dan kesatuan sebagai gerakan konvergensi, kebersamaan, dan vitalisasi etos nasional. Dengan demikian, kebudayaan bangsa merupakan perwujudan dari pemberdayaan seluruh potensi bangsa (*nation building*) demi pencapaian kematangan watak bangsa (*character building*) yang merdeka, berdaulat, mandiri, makmur, adil dan beradab sehingga mampu aktif dalam penciptaan perdamaian dunia.

E. Peradaban Modern dan Globalisasi

Peradaban modern menunjukkan adanya kecenderungan yang sangat kuat ke arah rasionalitas tata pikir penalaran sehingga pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi tampak semakin menonjol. Peradaban modern menjadi semakin silau oleh daya-daya rasionalitas karena dapat memetik segala macam buah yang dihasilkannya, seperti meningkatnya kehidupan ekonomi dan organisasi, dan industrialisme yang menghasilkan sebuah teknokultur.

Di dalam perkembangannya, teknokultur mencapai kemajuan pesat sehingga memperoleh sebutan superindustrialisme sebagai sindiran bahwa pencapaian efektivitas penalaran yang sedemikian maju terlaksana dengan mengabaikan moralitas sosial seperti keadilan dan kesetaraan hidup yang sesuai dengan martabat manusia karena kesamaan potensi dan peluang pengembangannya hanya menjadi asumsi yang tidak pernah mendapat verifikasi sosial.

Singkatnya, superindustrialisme sebagai bentuk pemanfaatan kemajuan penalaran dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah menjadi sebuah proses eksploitasi sumber daya manusia dan dehumanisasi dalam interaksi karena menempatkan manusia sebagai faktor dan fungsi produksi tanpa membangun hubungan sosial yang sepadan dengan harkat dan martabat manusia.

Bangunan teknokultur yang merupakan manifestasi kemonceran rasionalitas tersebut tidak hanya menunjukkan dinamisme logos alias akal budi tetapi justru menjadi sentral kehidupan budaya dan hukum satu- satunya dalam jalinan hubungan sosial masyarakat. Dengan begitu, logos melepaskan hubungan saling keterkaitannya dengan etos atau integritas manusia sehingga kepribadian dan martabat manusia tersingkir dari pusat arena kehidupan sosial tersebut.

Logos akhirnya hanya dipahami sebagai ketajaman otak atau akal, dan kehilangan aspek budi atau kebijaksanaan berpikir sehingga penalaran kehilangan keseimbangan- penalaran menjadi satu dimensi karena tidak diimbangi oleh budi. Sebagai konsekuensinya, etos akhirnya hanya dipahami sebagai formula verbal yang kaku dan beku sehingga kehilangan relevansi dalam peradaban teknokultur dengan segala konsekuensinya.

Manifestasi paling mencolok dari logos di dalam jalinan hidup sosial adalah munculnya manusia ekonomi atau *homo-economicus (economic animal)* yang menjadi pengejawantahan dari manusia berpikir atau *animal rationale (rational animal)*. Manusia ekonomi menggunakan rasionalitasnya untuk mengejar kemajuan perolehan materi yang berupa pemilikan benda-benda ekonomi. Kegairahan menambah kepemilikan benda-benda ekonomi ini disebut faham materialisme. Maka, sebagai konsep

ilmu sosial, budaya materialisme itu pada dasarnya merupakan fungsi dari rasionalisme sehingga keduanya memang tidak dapat dipisah-pisahkan. Maka, tidak mengherankan bila pembicaraan tentang peradaban modern- khususnya pascaindustri selalu menonjolkan kehidupan budaya konsumsi (*consumer culture*), kultus diri (*selfindulgence*), kedangkalan budaya massa (*mass culture*) dan pendewaan uang (*pecuniarily obsessed*) yang menyokong kehidupan kapitalisme dalam arti luas.

Dalam perjalanan sejarah budaya, materialisme tidak pernah berhenti terlibat dalam rangkaian interaksi dialektis dengan sosialisme, terutama gerakan komunitarianisme (*communitarian*), hingga akumulasi pemilikan dibatasi oleh rasa keadilan sosial yang antara lain diatur melalui sistem pajak progresif. Akibatnya, di dalam masyarakat industri dan pasca industri, materialisme menjadi lebih kompleks karena diimbangi oleh pemerataan dan keadilan di samping peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Sejalan dengan itu demokrasi yang semula liberalistis telah berubah menjadi populis karena suara dan tindakan setiap warga pada dasarnya diperhitungkan dalam proses berbangsa dan bernegara.

Budaya kewargaan (*civic culture*) terbentuk melalui aneka macam kegiatan kelompok (*social activism*) swadaya dan kepentingan, termasuk kelompok profesi, yang menjadikan masyarakat pascaindustri menjadi sebuah masyarakat sigap (*active society*).

Praktik demokrasi di dalam kehidupan sosial yang bergairah dengan aktivisme sosial seperti tersebut di atas telah melahirkan masyarakat kewargaan (*civil society*) sebagai cerminan dari konsep kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai tenunan sosial (*social fabric*) yang ditandai oleh jalinan harmonis dengan kesetaraan dan

keadilan dalam tata sosial (*social order*) disebabkan makin pudarnya jenjang-jenjang sosial (*social structure*).

Teknokultur pascaindustri (*post industrial and postmodern*) yang menjadi penyangga demokrasi kini menemukan bentuk dan menjadi kekuatan yang tidak dikenal sebelumnya, yakni globalisme. Pada dasarnya globalisme adalah sebuah faham atau kepercayaan dasar yang menyatakan bahwa semua manusia di dunia sesuai dengan hakikatnya mempunyai martabat yang sama, menghadapi persoalan yang sama, mempunyai kepentingan yang sama sehingga perlu menggalang usaha bersama untuk mewujudkan masa depan yang sama.

Globalisme yang digerakkan oleh negara-negara pascaindustri yang menguasai kemajuan teknologi industri, informasi dan komunikasi mengikat dunia menjadi satu desa dunia (*global village*) sehingga masyarakat negara-negara berkembang mau tidak mau dan siap atau tak siap masuk menjadi bagian dalam jaringan komunikasi dan informasi global village tersebut. Peran sentral masyarakat negara pascaindustri dalam proses globalisasi tersebut menimbulkan kesan kuat bahwa konsep globalisme sepenuhnya adalah perangkat buatan negara maju untuk menyiasati negara berkembang. Akibatnya, konsep kesamaan martabat harkat dan manusia, kesamaan kepentingan, kesamaan persoalan, dan usaha bersama demi penciptaan masa depan yang sama tersebut dianggap sebagai siasat Barat dan konsep asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya.

Pemahaman dan penerimaan globalisasi sebagai proses pemasyarakatan faham globalisme berlangsung lamban dan lama karena masyarakat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum berhasil mengejawantahkan filosofi, nilai-nilai dasar,

dan nilai sosialnya dalam kebudayaan bangsa yang berintegritas, mandiri, merdeka, majemuk dan modern berdasarkan konsep masyarakat bangsa yang modern, makmur, adil dan beradab sesuai dengan faham kebangsaan yang dianutnya.

Pencapaian terbesar globalisme dengan jaringan komunikasi dan informasi *global village* adalah efektivitas menciptakan keterbukaan dan kedekatan ketetanggaan dalam tata kehidupan bangsa-bangsa. “Keterbukaan dan kedekatan ketetanggaan” ini akan saling mempengaruhi *dan saling menergantungi* sehingga globalisme kian dapat dipahami sebagai sejalan, dan tidak bertentangan, dengan cita-cita pembentukan bangsa yang beradab, demokratis, maju, dan berkeadilan sosial.

Atas alasan tersebut hak asasi manusia hanya dapat diwujudkan dalam perlindungan dan jaminan atas kesamaan hak dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa serta berkeadilan dalam mewujudkan kehidupan sosial kebangsaan tersebut, yang antara lain ditandai oleh adanya saling pengertian dan saling menghargai dalam hubungan sosial antarpribadi ataupun antarbangsa di dalam konteks internasional. Hak asasi juga harus dapat dikaitkan dengan kesamaan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih sehingga menuntut kebersamaan usaha dalam pemuliaan lingkungan dan pemukiman.

Kesamaan hak dan keadilan dengan saling pengertian dan penghargaan makin menonjolkan watak paradoks dalam proses globalisasi (*global paradox*). Di satu pihak globalisasi mengakui adanya kesamaan harkat dan martabat manusia serta kebersamaan usaha mengatasi persoalan yang dihadapinya, sedangkan pada pihak yang lain globalisasi menuntut pengertian dan penghargaan terhadap identitas dan kepribadian satuan-satuan sosial yang membentuk etnisitas dengan keistimewaan budaya sebagai identitas

yang tidak dapat diganggu gugat.

Kesatuan usaha atau kerja sama menuntut dan mengarah pada penyeragaman, tetapi kesamaan hak mencuatkan kepribadian atau kekhasan identitas bangsa-bangsa sebagaimana dinyatakan di dalam budaya mereka masing-masing. Watak paradoksal dari globalisasi itu mengajarkan pentingnya keterbukaan untuk bekerja sama dan keterbukaan untuk menerima perbedaan budaya (*cultural tolerance*). Dengan demikian, kerja sama yang muncul dalam globalisasi adalah kerja sama saling menghargai dan saling menghormati. Kedua makna keterbukaan itulah yang akhirnya melahirkan produk.

Di dalam praktiknya, watak paradoksal globalisasi tersebut di atas dapat dirangkum menjadi satu rumusan: *think globally, act locally*. Hubungan antarbangsa dalam proses globalisasi terjadi bukan dalam pemisahan-pemisahan sektoral secara spesifik, melainkan dalam jalinan keseluruhan, yang dalam hal ini adalah politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang saling menjalin sehingga dapat mewujudkan hubungan antarbudaya (*cultural relationships*) secara luas.

F. Globalisasi dan Otonomi Daerah

Pemuliaan identitas budaya dalam konsep globalisme ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang dicetuskan pemerintah Indonesia di dalam menyongsong milenium baru. Kebijakan otonomi daerah telah mengubah paradigma kebudayaan bangsa yang semula berbentuk roda (*wheel*) menjadi bentuk lingkaran (*circle*). Pemahaman mengenai kebudayaan bangsa yang populer selama ini menganut model struktural sentralistik (*centralized structural model*) yang menunjukkan bahwa kebudayaan bangsa adalah poros atau pusat (*centrum*), sedangkan kebudayaan daerah adalah

pinggirannya (*perepheries*) dengan pengertian bahwa ikatan antara pusat dan masing-masing pinggiran adalah kuat dan satu arah.

Pusat menentukan hubungan dengan masing-masing pinggiran bukan interaksi saling mempengaruhi, sedangkan sebuah budaya pinggiran hanya memiliki satu hubungan dengan pusat saja sebagai penerima pengaruh tersebut dan tidak mempunyai hubungan dengan budaya pinggiran yang lain. Oleh karena itu, perubahan dan pergerakan budaya daerah sebagai periferal akan amat tergantung pada budaya pusat, sedangkan kebudayaan bangsa yang kekuasaan dan legitimasi berada di tangan pemerintah. Meskipun dalam pemerintahan Indonesia menganut faham demokrasi, dalam pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia jelas-jelas menganut faham feodalisme dan dalam praktiknya bentuk feodalisme ini menjadi semakin kokoh karena dukungan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk pendidikan formal. Akibatnya, feodalisme dalam paradigma pengembangan kebudayaan bangsa ini membawa dampak sampingan (*latent function*) yakni menyuburkan unsur feodal dalam kehidupan kebudayaan bangsa, yakni penyatuan melalui penyeragaman.

Dalam struktur feodal yang sentralistik ini kebudayaan daerah sebagai periferal tidak akan berkembang karena dinamisme yang melekat pada hakikatnya dibatasi oleh rekayasa pemerintah yang *de facto* berwatak feodal sehingga inisiatif dan kreativitas daerah disingkirkan dan tidak diberi peluang. Apabila hubungan masing-masing budaya periferal itu tergantung pada rekayasa feodal pemerintah pusat, hubungan antarbudaya dengan budaya periferal lain di wilayah nusantara tidak menjadi agenda rekayasa pemerintah pusat yang feodal.

Dalam konteks keterasingan antarbudaya (*cultural isolation*)

inilah kebakuan, kepasifan, kemandekan budaya daerah dapat dipahami. Isolasi dari pergaulan budaya dalam sejarah kebudayaan tidak pernah menjadi keterasingan mercu suar (*splendid isolation*) tetapi menjadi sumber kelesuan gairah hidup budaya (*entropy*). Daya cipta atau kreativitas budaya yang ditandai oleh munculnya pendekar budaya (*cultural hero*) dan penggagas cemerlang (*local genius*) menjadi semakin lemah dan hilang. Masyarakat-masyarakat daerah seolah-olah terbius oleh mimpi masa kemasaan (*golden age*) di masa silam dan seolah-olah tidak membutuhkan kebijaksanaan baru untuk menghadapi zaman modern yang penuh dengan perubahan.

“Biusan mimpi masa keemasan” itu menimbulkan dampak yang besar terhadap pembinaan dan pengembangan kebudayaan. *Pertama*, kehidupan budaya lokal menjadi statis dan terasing: kehilangan daya gerak sehingga menjadi tidak peka dan tidak peduli terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya. *Kedua*, kehidupan budaya yang acuh tak acuh tersebut diperparah lagi oleh kemandulan budaya karena kehilangan legitimasi budaya bagi setiap kemungkinan munculnya perubahan dan pembaruan oleh pendekar-pendekar budaya. *Ketiga*, perubahan penghayatan budaya karena unsur-unsur budaya yang dapat tertangkap oleh pancaindera, seperti benda-benda karya budaya, perilaku sosial dalam adat, istiadat, perayaan dan upacara terpisah dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai yang semula diasumsikan menjadi landasan berbagai karya budaya dan perilaku adat tradisi tersebut. Kecenderungan berperilaku, bertindak, dan berbicara proforma terutama terjadi karena banyak pemerintah. Begitulah terciptanya budaya birokrasi nasional yang mengakar pada nilai-nilai budaya, baik nasional maupun lokal.

Keempat, pemisahan perilaku dan wicara dari nilai-nilai tersebut telah menimbulkan kekalutan budaya (*cultural shock*) di tengah masyarakat sehingga muncul berbagai keagamaan dan krisis kepercayaan. Praktik-praktik pemisahan itu telah mengakibatkan nilai-nilai dasar dan nilai sosial di dalam tradisi budaya itu sendiri kehilangan fungsi.

Pada masa lalu, bila terjadi penyimpangan perilaku di tengah masyarakat, masyarakat secara konsekuen dan konsisten memberikan sanksi sosial (*social sanction*) berupa pengucilan. Dalam struktur feodal yang sentralistik ini penyimpangan-penyimpangan perilaku dan nilai-nilai dasar tidak dianggap bermasalah karena dapat dibenarkan dengan dalih demi efektivitas dan efisiensi birokrasi. Dengan demikian, birokrasi pemerintahan yang sentralistik sesuai dengan watak hakikinya lebih mengutamakan stabilitas melalui persatuan dan keseragaman daripada dinamisme perkembangan yang bersumber pada moralitas dan daya kreatif yang tercermin di dalam kemandirian dan interaksi antarbudaya di Nusantara.

Otonomi daerah secara konseptual menciptakan pola hubungan yang spesifik antarbudaya daerah dengan kebudayaan bangsa. Hubungan tersebut akan menjadi simetris sehingga masing-masing kebudayaan daerah akan menemukan kembali (*reinventing*) jati diri dan dinamikanya dalam jalinan tersebut. Dengan demikian, paradigma kehidupan kebudayaan dalam konteks otonomi daerah ini menjadi pola lingkaran yang tidak mengenal pusat atau poros (*axis*) dan memiliki hubungan harmonis dan saling mempengaruhi antarbudaya.

Dalam paradigma baru tersebut, kebudayaan bangsa juga tak akan berperan sebagai penguasa pusat (*central authority*), yang

dengan dalih keutuhan dan keamanan bangsa menjalankan fungsi penjaga pintu (*gate keeper*) dengan menyaring dan menghalangi masuknya arus globalisasi sehingga segenap kebudayaan daerah terasing dari proses globalisasi yang telah membuat seluruh pelosok dunia bergairah. Singkat kata, dengan paradigma lingkaran ini budaya-budaya daerah telah bebas dari praktik pengasingan Nusantara, antara budaya daerah yang satu dari yang lain (*divide et impera*), ataupun pengasingan global (*isolation*).

Paradigma lingkaran memberikan keterbukaan dan peluang yang seluas-luasnya pada kebudayaan daerah untuk pengembangan diri melalui penggalian potensinya yang terpendam dan peningkatan daya kreatifnya melalui interaksi dengan kebudayaan daerah lain, kebudayaan bangsa, dan kebudayaan dunia. Artinya, paradigma baru itu memberikan makna baru kepada kebudayaan daerah berupa jati diri dan harga diri, keterbukaan, pembelajaran lewat interaksi budaya yang saling menghargai, dan penentuan kembali posisi (*re-positioning*) dalam jaringan hubungannya dengan kebudayaan bangsa. Sebagai akibatnya, kebudayaan bangsa, termasuk birokrasi pemerintah, dalam paradigma baru tersebut perlu ditinjau kembali peran dan posisinya di dalam pengembangan diri dan pengembangan kebudayaan daerah demi perwujudan persatuan dalam kemajemukan kehidupan bangsa.

Dalam perubahan paradigma itu, penemuan kembali jati diri daerah tentu saja tidak dapat terlepas dari konteks keterbukaan yang memberi peluang interaksi dengan budaya daerah lain, budaya nasional, ataupun budaya global, mengingat interaksi budaya tersebut kini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi massa. Namun, perlu juga diingat bahwa tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi massa sangat

bervariasi sehingga kemampuan untuk melangsungkan interaksi budaya dengan penggunaan alat-alat modern itu juga berbeda-beda. Masyarakat di daerah yang jaringan komunikasi massanya belum berkembang tentu akan cenderung lebih tertutup daripada masyarakat lain yang lebih mapan jaringan komunikasi massanya. Dalam kondisi sedemikian itu, orientasi budaya masyarakat akan sempit dan terbatas pada budaya daerahnya sendiri. Keterbatasan orientasi yang merupakan kepicikan ini dapat berkembang menjadi fanatisme suku atau etnosentrisme kalau tokoh-tokoh kebudayaan daerah yang jumlahnya terbatas itu terpisah dari jaringan komunikasi massa nasional dan jaringan para ahli kebudayaan dalam jajaran pemerintahan pusat. Perkembangan fanatisme suku akan berbahaya bagi perkembangan budaya daerah serta hubungannya dengan budaya lain, termasuk budaya bangsa, karena umumnya kebudayaan daerah secara tradisional tidak terpisahkan dari jiwa dan tatanan feodal yang tertutup dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok elit yang sangat kecil.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam pelaksanaan otonomi daerah nantinya pemerintah pusat perlu mengembangkan koordinasi pemanfaatan jasa tenaga ahli dan seniman yang berpengalaman soal kebudayaan daerah. Hal itu bisa dilakukan dengan program konsultasi, penataran, serta penyusunan buku-buku pedoman pengembangan kebudayaan. Pusat-pusat kajian kebudayaan yang ada perlu meningkatkan jasa keahliannya di dalam pengembangan kebudayaan daerah, khususnya penggairahan studi, kegiatan-kegiatan kreatif di dalam kehidupan budaya dan kesenian daerah. Jadi, otonomi daerah tidak berarti pelepasan mutlak tanggung jawab pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Jalinan kerja sama dan bantuan melalui pemanfaatan jaringan komunikasi

massa dan tenaga ahli dibutuhkan untuk menjamin perkembangan kebudayaan daerah yang sehat sehingga tidak terjebak pada fanatisme suku yang penuh kecongkakan dan picik itu. Hanya dengan cara demikian itu interaksi budaya antarkebudayaan daerah dan dengan kebudayaan global akhirnya dapat berlangsung secara wajar dan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang demokratis dan saling menghargai dalam kemajemukan.

Pengembangan kebudayaan bangsa sebagaimana telah disinggung di atas dilakukan secara terencana dan sistematis demi intensitas dinamisme budaya yang sejalan dengan watak hakikinya. Dan, dinamisme budaya pada dasarnya merupakan manifestasi penghayatan kebudayaan masyarakat pendukungnya dalam pengembangan diri dan dalam menanggapi tantangan zaman. Penghayatan kebudayaan dalam rangka pengembangan diri dan dalam menanggapi tantangan zaman itu pada garis besarnya terjadi melalui proses sosialisasi dan pembelajaran segenap anggota masyarakat.

G. Strategi Sosialisasi dan Pembelajaran

Penghayatan kebudayaan tergantung pada tingkat efektivitas sosialisasi dan pembelajaran segenap anggota masyarakat. Konsep itu mengacu pada bagaimana segenap anggota masyarakat mengenal, menyikapi, dan melaksanakan nilai-nilai dasar dan moral kehidupan sosial dan personal dalam interaksi wacana ataupun perilaku di tengah masyarakat secara bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam pengembangan budaya yang terencana dan sistematis kedua konsep perlu dibedakan demi kejelasan aktivitas peran dalam prosesnya.

Konsep sosialisasi dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa generasi tua berperan aktif dalam proses pengenalan dan pengem-

bangun sikap ataupun pembentukan perilaku sosial yang pantas dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari penerimaan nilai-nilai dasar dan moral sosial ataupun personal. Keaktifan peran generasi tua tidak hanya sebagai perilaku aktif dalam penyebaran informasi dan pesan tentang nilai-nilai dasar dan moralitas sosial, tetapi dan terutama sebagai contoh dan anutan (*model*) sehingga generasi muda tidak hanya mengenal makna dan bagaimana bersikap yang sesuai, tetapi mengalami sendiri bagaimana konteks pelaksanaan nilai-nilai dasar dan moralitas sosial, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk perilaku. Sementara itu, pembelajaran digunakan dengan maksud untuk menonjolkan peran aktif generasi muda dalam mengenali, memikirkan, menyikapi, dan mengembangkan segenap nilai-nilai dasar dan moralitas sosial tersebut. Dalam proses pembelajaran itu rasionalitas atau penalaran dalam bentuk berkonteks realitas sosial. Oleh sebab itu, kedua konsep ini juga mempunyai alat-alatnya sendiri dengan dampak yang berbeda-beda.

Sosialisasi terjadi dalam konteks realitas sosial, artinya bagaimana hidup yang merupakan jaringan interaksi berbagai peran dan fungsi yang berbeda-beda serta mengandung seperangkat nilai dasar dan moralitas sosial tersebut dimanifestasikan. Lembaga-lembaga yang merupakan konteks realitas sosial dari proses sosialisasi adalah keluarga, kelompok-kelompok sosial pergaulan dan kemasyarakatan yang melahirkan berbagai kepentingan dan aktivisme sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, politik dan ekonomi, keagamaan, serta pemerintahan. Kelompok-kelompok sosial keagamaan merupakan kelompok informal yang penting karena memiliki pemimpin yang berkredibilitas, tetapi selama ini cukup terabaikan di dalam paradigma roda. Interaksi yang intensif antarberbagai kelompok kepentingan sosial kemasyarakatan dapat

meningkatkan efektivitas penyampaian tujuan dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi industri dan bisnis, khususnya industri media massa, untuk bersama-sama aktif dalam penyusunan jadwal (*agenda setting*) kehidupan publik. Dengan demikian, kelompok-kelompok sosial itu bisa berperan lebih efektif karena masuk ke dalam jaringan interaksi melalui berbagai media komunikasi baik media antarpribadi maupun media massa.

Sosialisasi keluarga misalnya, selain berlangsung dalam jaringan anggota keluarga dalam artian luas dan ketetanggaan, juga diperkuat oleh bacaan keluarga, bacaan anak-anak dan remaja serta majalah atau tabloid. Selain itu, proses sosialisasi tersebut masih mendapat dukungan sangat kuat dari berbagai kemasan media massa elektronik, khususnya acara-acara radio dan televisi, yang dapat mempengaruhi irama kehidupan sosial.

Dalam kehidupan modern yang bersifat industrial dan kekotaan, peranan wanita dan pemuda mengalami perubahan yang sangat besar. Peningkatan keterlibatan wanita dalam berbagai kegiatan di luar rumah tangga memperluas wawasan dan minat sehingga mereka tidak hanya mengandalkan sumber informasi dari pergaulan antarpribadi dan kelompok tetapi juga media massa. Dalam hal ini perlu disebutkan bahwa penerbitan majalah dan tabloid wanita, penerbitan buku bacaan pop, acara khas wanita di televisi menunjukkan bahwa kaum wanita memang memiliki peran sosial dan ekonomi yang kuat dalam masyarakat. Keterlibatan di dalam berbagai kegiatan di luar rumah tangga dan penggunaan media massa bagi wanita sangat penting untuk pengembangan diri dan juga di dalam pelaksanaan peran sebagai ibu rumah tangga. Berbagai studi di negara-negara industri ataupun berkembang menunjukkan bahwa kaum wanita memainkan peran yang jauh lebih besar daripada pria

dalam proses sosialisasi anggota keluarga. Wanita lebih unggul dari pria dalam menanamkan nilai-nilai dasar, moralitas sosial.

Pemuda sangat besar perannya dalam sosialisasi karena kehidupan sosial kemasyarakatan di luar rumah terutama, baik dalam intensitas maupun frekuensinya, berlangsung dalam bentuk kelompok pergaulan seusia dan jaringan antarkelompok. Selain dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi, pergaulan kelompok seusia berlangsung secara hangat dan saling mendukung sehingga mudah menimbulkan perasaan senasib (solidaritas), kesetiaan kelompok, tekad kerja sama, dan saling berbagi dan mempengaruhi dalam jangka panjang yang melahirkan pola perilaku dan sikap yang sama. Sosialisasi antarpemuda dalam masyarakat modern amat efektif karena bantuan media massa yang menonjolkan budaya kemudaan (*youth culture*), dalam bentuk gaya perilaku dan penampilan, cita rasa, dan kegiatan ataupun bahasa khas pemuda melalui penerbitan, dan acara radio dan televisi, serta film. Bahkan, penonjolan nilai-nilai kemudaan tersebut sampai menimbulkan dampak besar di kalangan kaum tua dalam masyarakat sehingga menumbuhkan berbagai bisnis kebugaran (*fitness*) dan industri kemudaan, termasuk penghitaman rambut dengan cat. Proses sosialisasi melalui berbagai lembaga sosial termasuk kelompok perempuan dan pemuda ini tidak secara langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Namun, pemerintah dapat memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan kelompok-kelompok tersebut dalam pelaksanaan kebijakan sosialisasi budaya.

Proses pembelajaran yang menonjolkan pemahaman terutama berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan formal. Lembaga-lembaga pendidikan formal, sejak taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi,

merupakan lembaga yang secara khusus dibangun untuk menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar, moralitas sosial, dan perilaku bertanggung jawab yang telah teruji melalui sejarah. Dalam proses pembelajaran kaum tua, yang secara formal diwakili oleh para guru, dosen, pimpinan lembaga, dan staf pendukungnya bertindak sebagai pamong (*tutor*) yang berfungsi sebagai pembimbing dan nara sumber.

Sebagai pembimbing dan nara sumber dalam proses pembelajaran ini, kaum tua perlu menaruh perhatian pada kelembagaan (*institutionalization*), konfigurasi dan susunan isi (*content*), dan fasilitas ataupun metode-metode agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, pemerintah memainkan peran yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung penentuan kriteria bagi pembimbing dan nara sumber, materi, fasilitas ataupun metode proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini peran pemerintah pusat perlu ditinjau kembali sehingga reposisi dapat berlangsung efektif.

Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan kebudayaan daerah, khususnya melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pemanfaatan jaringan komunikasi massa dan pemberdayaan jaringan ahli ilmu kebudayaan di berbagai lembaga, pusat studi, dan perguruan tinggi agar perkembangan kebudayaan daerah tersebut tidak menjurus ke fanatisme suku.

Dengan begitu para aktivis kebudayaan dan kesenian daerah dapat memperluas wawasan budaya sehingga tidak terbatas pada tradisi kebudayaan daerahnya sendiri, yang cenderung feodal dan terkungkung dalam lingkaran kelompok elit. Dengan hasil-hasil studi dan kajian, pengalaman dan keahliannya mengenai berbagai

warisan budaya di seluruh wilayah Nusantara ataupun di dalam peradaban dunia, mereka menggairahkan kehidupan daerah sehingga sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam proses industrialisasi, yang menjunjung tinggi kemandirian, kerja sama, tanggung jawab, interaksi saling menghargai, kesamaan martabat, demokrasi dan toleransi. Dengan begitu akan timbul kesadaran bahwa fanatisme suku sesungguhnya penghalang bagi perkembangan kebudayaan daerah. Singkatnya, pengembangan budaya daerah membutuhkan bantuan dan kerja sama pemerintah pusat.

Kiranya perlu dicatat bahwa di dalam rencana pelaksanaan otonomi daerah itu penyerahan penyelesaian persoalan daerah dalam bentuk kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat daerah tidak disertai dengan pengalihan sumber-sumber daya nasional, baik sumber dana maupun personel.

Penyiapan pamong yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan daerah masih dibutuhkan pelatihan, penataran, dan bahkan sertifikasi khusus. Dalam penyiapan dan penentuan materi, selain dibutuhkan penggalan lebih lanjut juga dibutuhkan penggodogan materi sehingga format dan kemasannya lebih cocok untuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Nilai-nilai kebudayaan yang terpendam dalam cerita mitos, epos, legenda, fabel, dan di dalam adat-istiadat mengenai siklus kehidupan, khususnya ritus dan upacara ritual, ataupun seni tari, seni musik, dan seni rupa yang berkonteks kehidupan sosial itu perlu digali lebih mendalam, ditafsirkan kembali maknanya, dan disajikan dalam format dan kemasan yang menggigit bagi kaum wanita dan kaum muda yang merupakan dua kekuatan utama dalam proses sosialisasi dan pembelajaran. Pemaknaan kembali atas semua bentuk warisan

budaya dan kesenian itu dimaksudkan supaya nilai-nilai budaya yang terkandung dapat diterjemahkan ke dalam wacana nilai-nilai masyarakat moderen. Dengan demikian, pengembangan kebudayaan merupakan kehidupan yang berkelanjutan, *sustainable*.

Jasa ilmuwan kebudayaan juga dibutuhkan dalam proses pembelajaran melalui kepekaannya mengemas harta warisan kebudayaan dan seni, seperti candi dan museum, menjadi wisata budaya, yang tidak hanya akan memberikan kesegaran sebagai hiburan tetapi juga kesadaran tentang akar jati diri masyarakat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemanfaatan media tradisional seperti buku-buku cerita ataupun media baru seperti koran, majalah, radio, dan televisi perlu dikembangkan. Hasil budaya tradisional baik dalam bentuk sastra, musik maupun tari dengan seni rupanya akan menjadi lebih menarik bagi kaum muda, misalnya, bila disajikan dalam format dan kemasan yang cocok untuk mereka, yakni sebagai bagian dari kebudayaan massa dan populer, seperti bacaan komik, cerita bersambung, drama berseri, atau opera khususnya untuk televisi atau radio. Hanya dengan kemasan dan format budaya pop itu hasil-hasil budaya tradisional dapat menjangkau kaum muda secara efektif. Di dalam penyiapan materi dan format penyajiannya perlu diperhatikan konsistensi antarproses, yakni antara proses pembelajaran dan sosialisasi sehingga tidak terjadi pertentangan yang membingungkan bukan saja bagi kaum muda melainkan juga bagi pamong, termasuk keluarga dan kelompok-kelompok kepentingan sosial.

Pemanfaatan media massa sudah barang tentu akan lebih memudahkan proses hubungan antarkebudayaan se-Nusantara. Dengan media massa, hubungan antarkebudayaan tidak hanya terjadi

melalui serangkaian komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*) yang melibatkan berbagai orang dan kelompok dari dua budaya atau lebih yang berbeda dalam pertemuan secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung dengan rangkaian kegiatan tukar-menukar budaya (*cultural exchange*), serta pengenalan budaya (*intercultural encounter*).

Dengan pemanfaatan media massa, kaum muda tidak hanya secara efektif dapat dijangkau oleh hasil kebudayaan tradisi, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam penggalan, pembelajaran, penafsiran kembali, penemuan nilai-nilai budaya, dan penciptaan karya budaya. Keterlibatan kaum muda akan dapat menambah harga diri, rasa saling menghormati dan mempercayai, serta tekad untuk bekerja sama. Proses pembelajaran ini akan semakin efektif dan memberikan pemahaman mendalam bilamana disertai keteladanan budaya oleh para pembimbing dan nara sumbernya.

Keteladanan budaya dalam proses pembelajaran dapat lebih efektif apabila dimungkinkan terjadinya partisipasi dan keterlibatan kaum wanita. Peran kaum wanita dalam proses sosialisasi dan pembelajaran kebudayaan, dalam konteks otonomi daerah dan globalisasi yang berwatak paradoksal ini semakin penting karena dapat menjadi dukungan moralitas sosial dan keagamaan sehingga peran rasionalitas yang menonjol dalam proses pembelajaran, penciptaan pemahaman, tak terpisah dari rasa sosial, yakni relasi sosial dengan segala peran dan tanggung jawabnya. Artinya, pemahaman budaya, baik budaya daerah sendiri, kebudayaan bangsa, maupun kebudayaan Nusantara lain dan kebudayaan global ditafsirkan dengan dasar sosialisasi dan konteks hubungan sosial.

Dalam kaitan tersebut perlu diingat bahwa dalam pemahaman dan pemaknaan kebudayaan kaum wanita jauh lebih kontekstual

dan realistis daripada kaum pria sehingga konsistensi budaya di kalangan kaum wanita lebih besar daripada kaum pria.

Apabila keterbukaan budaya daerah dalam penemuan identitas diri, reinterpretasi, dan reposisi diri dalam menghadapi budaya daerah lain, ataupun dalam mengacu kepada kebudayaan bangsa dan menyikapi budaya global dapat berlangsung secara wajar. Maka, pemahaman kebudayaan dalam proses pembelajaran semakin mantap karena dilandasi pula oleh semangat kebersamaan sosial dan tanggung jawab yang dihayati melalui peneladanan yang sejalan dengan proses sosialisasi. Dengan penyesuaian antara proses pembelajaran dan proses sosialisasi dapat diharapkan bahwa proses pembelajaran yang lebih rasional tidak akan tercerabut dari akar budayanya sehingga kemungkinan munculnya manusia ekonomi yang individualis dapat diimbangi oleh menguatnya kebersamaan sosial.

Sebagai kesimpulan dari uraian tersebut di atas adalah, di dalam pengembangan dan pembinaan budaya, pemerintah perlu mengembangkan strategi keterbukaan dan pencerahan supaya budaya daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan globalisasi ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-cita kebudayaan bangsa yang utuh dan integral dengan pluralitas sehingga tidak tersesat ke dalam etnosentrisme yang picik dan cenderung disintegratif serta deformatif karena kembali ke feodalisme lokal.

Dengan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya bentuk, nilai dan pandangan dasar budaya melalui proses pembelajaran dan menghayatinya dengan peneladanan melalui sosialisasi dengan pemberdayaan segenap kekuatan sosial kemasyarakatan, kehidupan budaya akan berkembang menjadi aspiratif, inovatif, serta adaptif tanpa menimbulkan keangkuhan bangsa.



Posisi geografis Indonesia yang terletak di persimpangan benua dan samudera, serta posisi kultural Indonesia yang terletak di pertengahan antara budaya Barat dan budaya Timur telah menjadikan Indonesia sebagai 'jembatan budaya' antara Barat di satu sisi dengan Timur di sisi yang lain.

Di dalam posisi yang demikian itu bangsa Indonesia semakin dituntut meningkatkan ketahanan budaya yang dimilikinya. Tanpa adanya usaha peningkatan ketahanan budaya secara memadai maka kebudayaan Indonesia bukan saja tidak pernah akan mampu memberi kontribusi dalam pembentukan kebudayaan global; akan tetapi lebih daripada itu kebudayaan Indonesia akan sangat mudah larut dalam pertemuan antarbudaya.

Pertemuan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya secara evolutif akan menghasilkan struktur dan sistem masyarakat yang baru; yang sering disebut dengan Masyarakat Indonesia Baru atau Masyarakat Madani Indonesia. Masyarakat Indonesia Baru yang didambakan adalah suatu masyarakat yang berperilaku sosial secara berbudaya, mempunyai daya respon kultural yang memadai, mempunyai toleransi kultural antarbangsa, berketahanan budaya tinggi, serta mampu memberikan kontribusi di dalam percaturan budaya global.

Untuk mencapai masyarakat Indonesia Baru yang didambakan itu maka diperlukan sistem dan metode pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang di dalamnya mengandung strategi dan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia itu sendiri.